



UNIVERSITAS INDONESIA



**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS GERAKAN
*ECOSOPHY***

SKRIPSI

**JEFFERY JEREMIAS
NPM 0606091634**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS GERAKAN
*ECOSOPHY***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**JEFFERY JEREMIAS
NPM 0606091634**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2010**

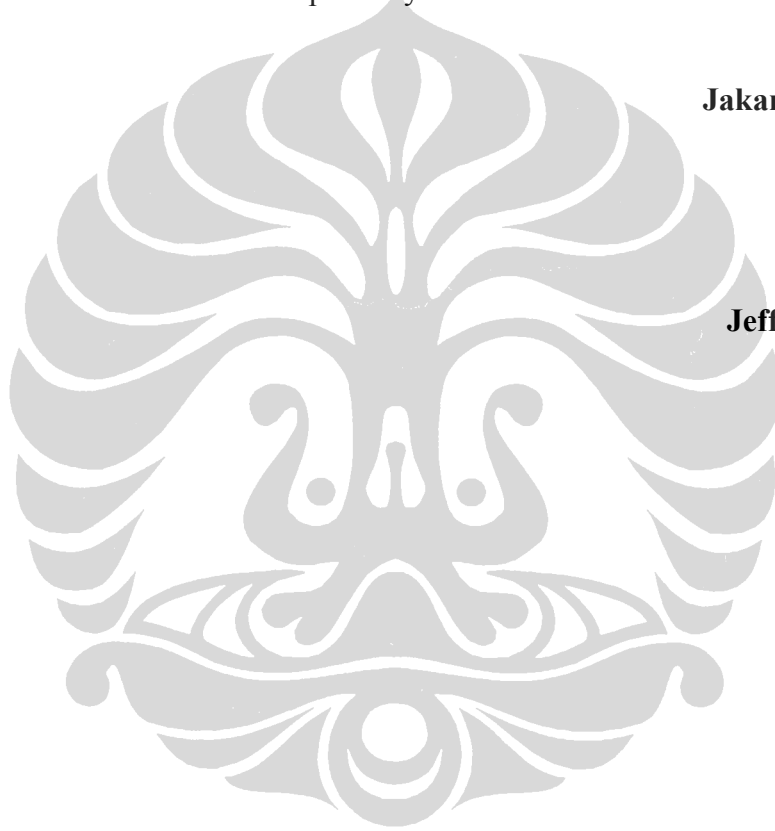
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 2 Juli 2010

Jeffery Jeremias



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Jeffery Jeremias

NPM : 0606091634

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Jeffery Jeremias
NPM : 0606091634
Program Studi : Ilmu Filsafat
judul : Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan
Ecosophy

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora, pada Program studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Naupal (.....)

Penguji : Vincensius Yohanes Jolasa, Ph.D (.....)

Penguji : Dr. Akhyar Yusuf Lubis (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Yesus Kristus yang karena penyertaannya saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Penulisan skripsi ini terinspirasi dari kesenangan saya dalam membahas permasalahan etika. Penulisan skripsi ini juga turut memberikan tambahan wawasan kepada saya tentang permasalahan mengenai lingkungan. Dimana lingkungan atau alam dipandang begitu luas dan kompleks. Hal ini lah yang membuat saya menjadi tertarik dan meletakkan posisi saya sebagai *ecosopher* (pengikut gerakan *ecosophy*).

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada **Dr.Naupal** selaku pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan informasi yang diberikan lewat diskusi singkat. **Dr. Akhyar Yusuf Lubis** dan **Vincensius Yohanes Jolasa, Ph.D** selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan skripsi saya ini.

Terima kasih yang sangat mendalam dari saya untuk **MAMA** dan **BAPA** yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, motivasi kepada saya untuk menulis skripsi ini. Mereka yang selalu memberikan dorongan kepada saya untuk mau menulis dan menjadi inspirasi bagi saya dalam menulis skripsi ini. Terima kasih juga untuk **Bang Andrew, Ka Lia, Ka Joice, Bang Anton** yang telah memberikan dukungan doa, materi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Trima kasih untuk **Laura** yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.

Untuk teman-teman satu angkatan saya, **filio, oto, dito, agung, moti, ado, aw, fasikom, dll....manto, warung tandjung, anto, sandro, daka, dll....**saya mengucapkan trima kasih untuk bantuan yang telah diberikan. Begitu juga untuk semua orang atau badan yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Terakhir saya mengucapkan trima kasih untuk **Anatri Rolin** yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, dan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini baik dalam penulisan maupun pencarian bahan materi penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

JOICE & LAURA



Jakarta, 2 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeffery Jeremias
NPM : 0606091634
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan *Ecosophy*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2010
Yang menyatakan

(Jeffery Jeremias)

DAFTAR ISI

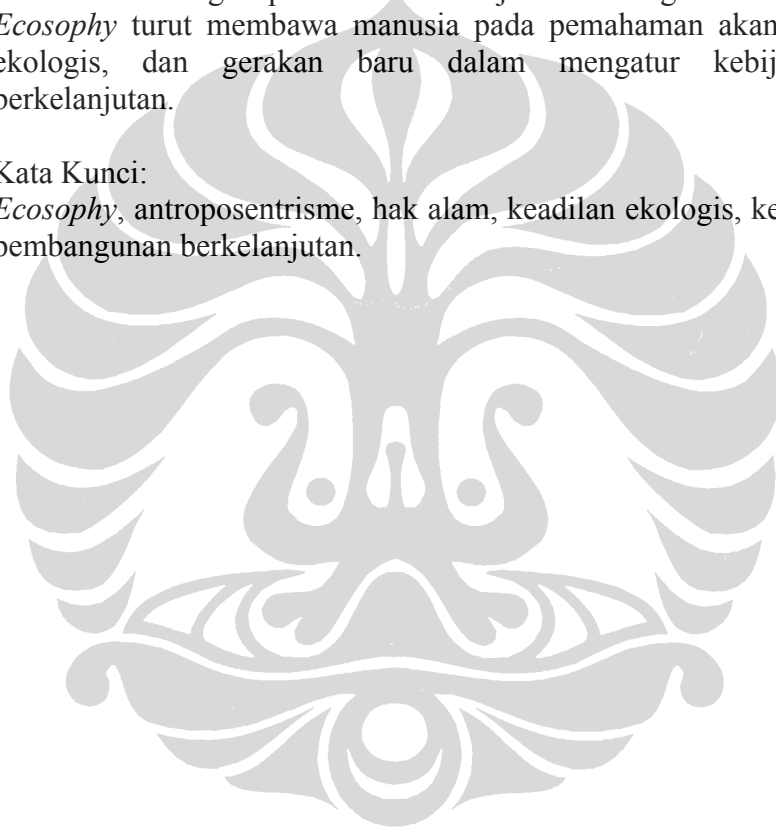
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Thesis Statment.....	5
1.4 Metode penelitian.....	5
1.5 Tujuan Penulisan.....	5
1.6 Teori.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
2. ANTROPOSENTRISME DAN PEMBANGUNAN.....	11
2.1 Keterarahan Terhadap Paradigma Antroposentrisme.....	11
2.2 Antroposentrisme.....	15
2.3 Antroposentrisme dan Pembangunan.....	16
2.4 Kritik Terhadap Antroposentrisme.....	19
2.4.1 Biosentrisme.....	19
2.4.2 Ekosentrisme/ <i>deep ecology</i>	22
3. HAK ALAM.....	25
3.1 Hak Alam.....	25
3.2 Keadilan Ekologis.....	31
4. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN dan ECOSOPHY.....	33
4.1 Pembangunan berkelanjutan.....	33
4.2 Arah etika lingkungan dalam pembangunan.....	37
4.3 <i>Ecosophy</i> sebagai gerakan baru.....	38
4.4 Kesalahan Arah Pembangunan.....	42
4.5 Peran Pemerintah Dalam Proses Pembangunan.....	44
4.6 Kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.....	46
5. REFLEKSI KRITIS.....	48
5.1 Keberlanjutan Sebagai Jalan Utama.....	50
5.2 Nilai Kehidupan Bukan Nilai Materi.....	51
DAFTAR REFERENSI.....	53

ABSTRAK

Nama : Jeffery Jeremias
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan *Ecosophy*

Skripsi ini mempunyai fokus pada pembahasan mengenai paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis gerakan *ecosophy*. *Ecosophy* di sini merupakan sebuah counter dari paradigma sebelumnya, antroposentrisme, yang mengedepankan manusia sebagai tujuan utama. Dalam orientasi pembangunan berkelanjutan berbasis gerakan *ecosophy* arah kebijakan pembangunan tidak lagi mengedepankan keberlanjutan materi atau pun keberlanjutan manusia belaka, melainkan mengedepankan keberlanjutan ekologis dan keadilan ekologis. *Ecosophy* turut membawa manusia pada pemahaman akan hak alam, kesatuan ekologis, dan gerakan baru dalam mengatur kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci:
Ecosophy, antroposentrisme, hak alam, keadilan ekologis, keberlanjutan ekologis, pembangunan berkelanjutan.



ABSTRACT

Name : Jeffery Jeremias
Study Program : Philosophy
Title : Sustainable development based on ecosophy movement

This thesis focused on the discussion of the sustainable development paradigm based on ecosophy movement. Ecosophy is a counter to the previous paradigm, anthropocentrism, which emphasizes on human as the main end. The central point in sustainable development based ecosophy movement is not promote the material or benefit only to human, but rather promote ecological sustainability and ecological justice. Ecosophy helped bring men to the understanding of natural rights, ecological unity, and a new movement in organizing a sustainable development policy.

Keywords:

Ecosophy, anthropocentrism, natural rights, ecological justice, ecological sustainability, sustainable development.



BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang semakin terbatas diiringi dengan pertumbuhan manusia di bumi adalah penyebab dari ketidakseimbangan ekosistem. Permasalahan ini merupakan dasar dari timbulnya berbagai kerusakan lingkungan baik itu yang disebabkan oleh manusia, lewat eksploitasi besar-besaran demi memenuhi kebutuhan manusia, maupun yang disebabkan oleh kerusakan alam secara alami.

Permasalahan kerusakan lingkungan merupakan masalah lama yang terus membayangi tiap generasi yang ada. Kesalahan cara pandang manusia terhadap alam merupakan dasar dari permasalahan krisis ekologi. Manusia pada awalnya mempunyai paradigma bahwa manusia adalah pusat dari segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah paradigma yang dinamakan antroposentrisme. *Anthropocentric (“human-centred”) ethics holds that only human beings have moral value. Thus, although we may said to have responsibilities regarding the natural world, we don’t have direct responsibilities to the natural world* (Jardins 10). Dari pemahaman ini lah maka manusia terus mengeksploitasi alam secara terus menerus.

Berpegang dari cara pandang antroposentrisme maka manusia berhak dan mempunyai wewenang untuk mengeksploitasi alam secara maksimal demi tercapainya keinginan manusia semata. Pengeksploitasian alam itu terlihat dari beberapa tindakan manusia seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan baik itu berasal dari limbah industri maupun pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor.

Dari semua faktor penyebab kerusakan lingkungan, polusi udara adalah penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 85 persen. Hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari

penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik misalnya kadar timbal yang tinggi (Alamendah para 3). Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang diakses melalui badan pusat statistik.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2008

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1987	1 170 103	303 378	953 694	5 554 305	7 981 480
1988	1 073 106	385 731	892 651	5 419 531	7 771 019
1989	1 182 253	434 903	952 391	5 722 291	8 291 838
1990	1 313 210	468 550	1 024 296	6 082 966	8 889 022
1991	1 494 607	504 720	1 087 940	6 494 871	9 582 138
1992	1 590 750	539 943	1 126 262	6 941 000	10 197 955
1993	1 700 454	568 490	1 160 539	7 355 114	10 784 597
1994	1 890 340	651 608	1 251 986	8 134 903	11 928 837
1995	2 107 299	688 525	1 336 177	9 076 831	13 208 832
1996	2 409 088	595 419	1 434 783	10 090 805	14 530 095
1997	2 639 523	611 402	1 548 397	11 735 797	16 535 119
1998	2 769 375	626 680	1 586 721	12 628 991	17 611 767
1999*)	2 897 803	644 667	1 628 531	13 053 148	18 224 149
2000	3 038 913	666 280	1 707 134	13 563 017	18 975 344
2001	3 261 807	687 770	1 759 547	15 492 148	21 201 272
2002	3 403 433	714 222	1 865 398	17 002 140	22 985 193
2003	3 885 228	798 079	2 047 022	19 976 376	26 706 705
2004	4 464 281	933 199	2 315 779	23 055 834	30 769 093
2005	5 494 034	1 184 918	2 920 828	28 556 498	38 156 278
2006	6 615 104	1 511 129	3 541 800	33 413 222	45 081 255
2007	8 864 961	2 103 423	4 845 937	41 955 128	57 769 449
2008	9 859 926	2 583 170	5 146 674	47 683 681	65 273 451

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

*) sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Sedangkan disisi lain hutan di Indonesia pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Dimana jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan karena penebangan hutan secara ilegal, penambangan, dan aktivitas manusia dalam mendukung kehidupan, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan di Indonesia semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh

hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi (Rhett A. Butler diterjemahkan oleh indie para 4).

Terlihat jelas bahwa pandangan antroposentrisme membawa manusia kepada krisis lingkungan. Dimana jika kita menghubungkan antara paradigma antroposentrisme dikaitkan dengan pola pembangunan, maka akan terlihat bahwa pola pembangunan akan mengarah kepada kepentingan manusia belaka tanpa melihat aspek nilai yang dimiliki alam itu sendiri. Hal inilah yang menjadi ketakutan banyak pecinta lingkungan, dimana alam ini akan hancur ketika kesadaran akan pentingnya menghargai alam itu hilang.

Secara radikal antroposentrisme melihat alam berdasarkan pada fungsi kegunaannya belaka. Manusia tidak lagi menghormati alam sebagai entitas yang bernilai, alam pun dipandang tidak mempunyai hak untuk berkembang secara alami. Dalam hal ini cara pandang manusia terhadap alam merupakan kunci dari penyelesaian masalah krisis ekologi yang terjadi saat ini, dan bahkan sudah lama diperdebatkan pada awal tahun 1960an. Pola hidup manusia yang mempunyai tendensi atau kecenderungan hedon juga merupakan dasar relasi yang buruk dengan alam, baik itu manusia sendiri maupun dengan lingkungan.

Peranan manusia dalam mengontrol tindakannya dalam berelasi dengan alam perlu ada yang dinamakan dengan *ecosophy*. *Ecosophy* secara etimologis adalah kombinasi antara “*eco*” yang berarti rumah tangga dan “*sophy*” yang berarti kearifan (Keraf 78). Dimana dalam *deep ecology*, *ecosophy* adalah sebuah kearifan bagi manusia untuk hidup dalam keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai sebuah rumah tangga dan juga merupakan sebuah bentuk gaya hidup baru yang menghargai alam sebagai sesuatu yang bernilai (Jardins 201-203). Dalam hal ini fokus kontrol yang dibicarakan adalah bentuk sebuah tatanan kota yang dimana perencanaan pembangunan kota berdasarkan pada *ecosophy*.

Dengan adanya sebuah kontrol lewat gaya hidup dan juga paradigma baru terhadap alam, maka memungkinkannya terjadi sebuah keseimbangan hidup antara manusia dengan alam. Dalam hal ini keseimbangan disini adalah “nilai

mutlak” yang harus diperjuangkan. “Nilai mutlak” yang ingin dicapai bukan berarti keseimbangan mengandaikan adanya persamaan (50-50) antara alam (ruang hijau) dengan pembangunan. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai bentuk etika pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan tetap mempertimbangkan aspek manusia maupun makhluk lainnya.

Kebijakan maupun gaya hidup menjadi arahan atau motor penggerak untuk tercapainya sebuah perubahan menuju pada sebuah keseimbangan hidup. Dalam hal ini Arne Naess memberikan sebuah rumusan gaya hidup “Sederhana dalam sarana, tapi kaya akan tujuan” (*simple in means but rich in ends*), dan bukan gaya hidup yang mementingkan materi sebagaimana gaya hidup kebanyakan orang modern (Naess 88). Paradigma baru di dalam memandang alam, meletakkan *ecosophy* sebagai landasannya, diharapkan dapat mengubah pola pikir manusia mengenai relasinya dengan alam dan pengambilan kebijakan pembangunan.

1. 2 Rumusan Masalah

Krisis pengetahuan mengenai pentingnya memahami alam sebagai kesatuan yang utuh dengan manusia itu sendiri memang sulit. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana hampir semua hal bersifat instan dan sifat manusia yang tidak mau berpikir untuk kepentingan bersama yaitu alam itu sendiri. Manusia tidak lagi mementingkan generasi mendatang yang akan menempati bumi ini, mereka hanya mementingkan waktu sekarang dimana mereka hidup. Prinsip yang dipegang dalam menyelesaikan masalah lingkungan disini adalah diperlukannya komitmen bersama untuk berpegang pada satu prinsip yaitu *ecosophy*.

Sebagai satu kesatuan dengan alam, manusia seharusnya menjalin hubungan atau berelasi dengan alam secara baik. Hal ini seharusnya tercermin dari kebijakan manusia itu sendiri di dalam mengelola alam. Paradigma yang tertanam selama ini perlu diubah khususnya cara pandang yang bersifat antroposentrisme. Manusia tidak lagi harus mengeksploitasi alam secara besar-

besaran, dikarenakan alam ini bukan milik satu generasi tertentu yang hidup pada jangka waktu yang singkat pula.

Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan khusus pada bab selanjutnya. Pertanyaan tersebut antara lain adalah :

1. Adakah relasi antara paradigma dalam hal ini cara manusia memandang alam dengan tindakan manusia khususnya realisasinya dalam pola pembangunan itu sendiri?
2. Adakah persamaan antara manusia dengan makhluk lainnya khususnya binatang dan tumbuhan dalam kaitannya dengan hak?
3. Bagaimanakah merealisasikan pemikiran *ecosophy* ke dalam bentuk kebijakan pembangunan jangka panjang?

1. 3 Thesis Statment

Kesadaran manusia sebagai bagian dari alam merupakan dasar untuk membentuk keseimbangan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.

1. 4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka dan hermeneutika. Dimana penulis memberikan gambaran mengenai masalah krisis ekologi dikaitkan dengan pemikiran Arne Naess khususnya pemikirannya mengenai *ecosophy* kaitannya dengan pola pembangunan berkelanjutan dari berbagai sumber. Selain memberikan gambaran mengenai *ecosophy*, penulis juga memberikan interpretasi baru tentang *ecosophy* melalui metode hermeneutika. Dalam hal ini penulis juga akan memberikan analisa kritis mengenai pembahasan yang ada.

I. 5 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah membahas masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai krisis ekologi dikaitkan dengan gaya hidup manusia modern didalam memandang alam sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan hidup manusia belaka. Adapun tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan secara deskripsi mengenai masalah krisis ekologi yang terjadi karena cara pandang manusia modern terhadap alam.
2. Memberikan penjelasan mengenai permasalahan hak alam dan perdebatan mengenai permasalahan hak alam itu sendiri.
3. Memberikan penjelasan mengenai solusi dari penyelesaian masalah krisis ekologi dengan cara pandang *ecosophy* dikaitkan dengan pola pembangunan berkelanjutan.
4. Penulisan skripsi ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat untuk lulus sebagai sarjana humaniora (S.Hum).

Diharapkan pula dari penulisan ini dapat berguna bagi pembaca, khususnya yang mempunyai minat bahasan mengenai etika lingkungan dengan pendekatan *ecosophy*.

1. 6 Teori

Seperti kita tahu bahwa dalam etika lingkungan ada tiga teori besar yang turut membawa manusia kepada pembentukan relasi manusia dengan alam. Ketiga teori tersebut adalah antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Dalam hal ini teori yang saya gunakan untuk membahas masalah krisis ekologi kaitannya dengan pola pembangunan global adalah dengan menggunakan teori dari *deep ecology* yang diperkenalkan oleh Arne Naess.

Deep ecology disini merupakan semacam bentuk penghormatan terhadap alam, dimana bentuk penghormatan itu diaplikasikan lewat apa yang disebut dengan *Ecosophy*. *Ecosophy* disini merupakan bentuk perubahan gaya hidup yang mengarah kepada kepedulian akan alam. Gaya hidup disini merupakan cara kita dalam berelasi dengan alam dengan kesederhanaan. Cara pandang *ecosophy* ini merupakan sebuah pemahaman kita mengenai alam, dimana alam merupakan sesuatu yang bernilai dan kita manusia mempunyai keterkaitan dengan alam.

Keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dengan teori *deep ecology* khususnya dalam cara pandang *ecosophy* adalah adanya pemahaman bahwa alam itu bukan sekedar untuk manusia belaka, melainkan adanya keterkaitan satu sama

lain. Dalam hal ini *deep ecology* berfungsi sebagai regulator dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Kritik *deep ecology* terhadap pemikiran sebelumnya khususnya antroposentrisme adalah pada cara pandang manusia memperlakukan alam.

Dalam permasalahan berkelanjutan yang dihadapi khususnya mengenai pembangunan berkelanjutan, *deep ecology* memberikan delapan platform sebagai acuan dalam membuat kebijakan pembangunan berkelanjutan. Platform tersebut antara lain adalah (Amstrong, Botzler 412 ; Keraf 84-85) :

1. Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi ini mempunyai nilai pada dirinya sendiri. nilai-nilai ini tidak tergantung dari apakah dunia di luar manusia mempunyai kegunaan atau tidak bagi kehidupan manusia
2. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan mempunyai sumbangsih bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dan juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan mempunyai sumbangsih bagi perkembangan manusia dan bukan manusia di bumi ini
3. Manusia tidak mempunyai hak untuk mereduksi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital
4. Perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaannya berjalan seiring dengan penurunan yang cukup berarti dari jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan di luar manusia membutuhkan penurunan jumlah penduduk
5. Campur tangan manusia dewasa ini terhadap dunia di luar manusia sudah sangat berlebihan dan situasi ini semakin memburuk
6. Perlu ada perubahan kebijakan sehingga mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi dan ideologi. Hasilnya akan berbeda dari keadaan sekarang ini
7. Perubahan ideologis terutama menyangkut penghargaan terhadap kualitas kehidupan dan bukan bertahan pada standar kehidupan yang semakin meningkat. Akan muncul kesadaran mengenai perbedaan antara besar dan megah.

8. Orang-orang yang menerima pokok-pokok pemikiran itu mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk ikut ambil bagian mewujudkan perubahan-perubahan yang sangat diperlukan.

Selain dari delapan platform diatas *deep ecology* juga mempunyai lima prinsip yang mendasari pemikiran dan gerakan *deep ecology* dalam mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam. Kelima prinsip itu adalah

1. *Biospheric egalitarianism*
2. *Non-antroposentrisme*
3. *Self-realization* (realisasi diri)
4. Pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis
5. *Eco-politics*

Jelas bahwa dalam delapan platform dan prinsip-prinsip gerakan lingkungan yang ada diatas terdapat ajakan untuk mengubah cara kita bertindak terhadap alam, khususnya lewat pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pandangan *deep ecology* maka pembangunan berkelanjutan tidak lagi diarahkan pada kepentingan manusia belaka melainkan kepada kepentingan bersama, dimana semua makhluk hidup mempunyai keterkaitan satu sama lain dan memandang alam sebagai sesuatu yang berarti. *A central slogan of ecosophical lifestyle: "simple in means, rich in ends".* (Naess 88)

1. 7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari :

Bab I : Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, thesis statement, metode penelitian, tujuan penelitian, teori yang digunakan dan sistematika penulisan. Dimana dalam latar belakang penulisan, penulis memberikan penggambaran masalah yang dibahas. Sedangkan dalam rumusan masalah penulis memberikan batasan-batasan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Dalam rumusan masalah ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada bab selanjutnya secara rinci dan menyeluruh. Dalam thesis statement, penulis memberikan hipotesa awal untuk dibuktikan dalam

penulisan skripsi ini. Dalam metode penulisan, penulis menggunakan metode studi pustaka, dimana penulis juga mendeskripsikan masalah yang ada dan juga penulis memberikan analisa kritis terhadap penulisan skripsi ini. Dalam tujuan penulisan ini, penulis menjelaskan maksud dan tujuan penulisan skripsi ini dalam poin-poin yang ada pada tujuan penulisan. Dalam teori, penulis memberikan gambaran mengenai teori yang digunakan dalam membahas masalah yang ada di skripsi ini, khususnya etika lingkungan. Sedangkan dalam sistematika penulisan, penulis memberikan gambaran akan isi keseluruhan skripsi ini.

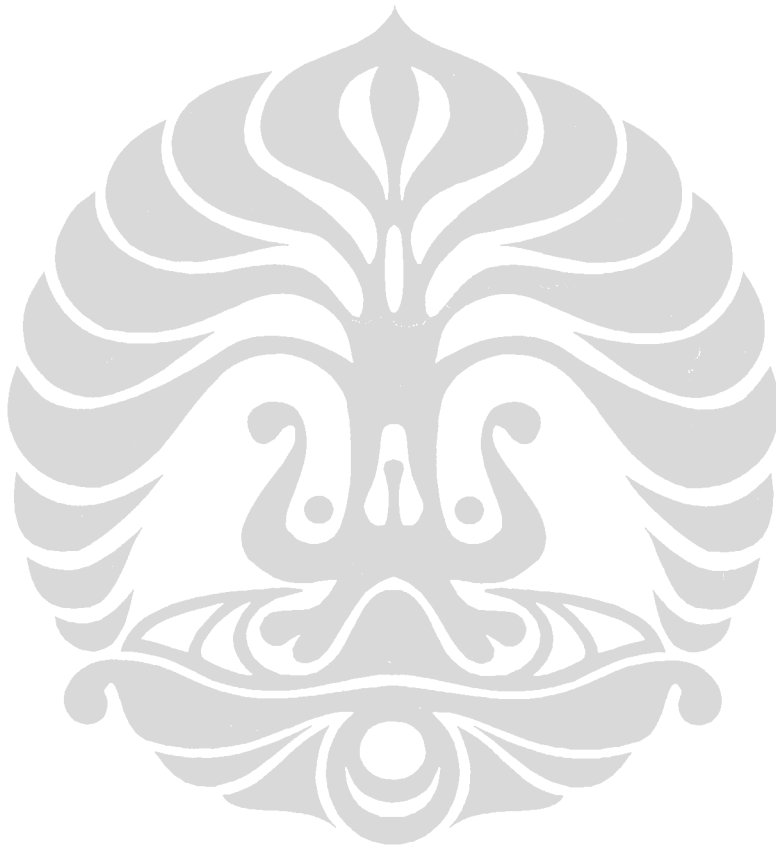
Bab II : Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai problem antroposentrisme dan kerusakan lingkungan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai paradigma antroposentrisme dan faktor munculnya paradigma antroposentrisme itu sendiri. Setelah menjelaskan mengenai paradigma antroposentrisme maka dijelaskan juga mengenai keterkaitan antara paradigma antroposentrisme dengan kerusakan lingkungan yang terus membayangi tiap generasi di muka bumi ini.

Bab III : Dalam bab ini akan membahas mengenai hak alam. Pembahasan dalam bab ini akan coba menjelaskan secara deskriptif mengenai hak-hak alam. Dalam bab ini juga akan ada penjelasan mengenai penolakan dan penerimaan hak-hak alam.

Bab IV : Pada bab ini akan dibahas mengenai pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan pemikiran Arne Naess mengenai *deep ecology*. *Deep ecology* disini berupa sebuah gerakan yang diperkenalkan Arne Naess yaitu *ecosophy*. Lewat sikap *ecosophy* maka diharapkan akan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, hal ini didasarkan pada cara pandang manusia terhadap alam. Dimana manusia itu sebenarnya mempunyai kesatuan dengan alam, dan dalam hal ini manusia dengan alam saling berhubungan.

Bab V: Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini juga akan berisikan sebuah analisa penulis mengenai permasalahan yang diangkat. Dimana analisa dikaitkan dari teori dengan penerapan dan efek yang dicapai setelah penggabungan antara teori dan bentuk praktis dari etika lingkungan, khususnya *ecosophy* dengan pembangunan

berkelanjutan yang melihat semua aspek yang ada di alam merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan.



BAB 2

Antroposentrisme dan Pembangunan

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bukanlah kejadian yang terjadi begitu saja, melainkan ada faktor penyebab atau indikator yang menyebabkan alam ini menjadi krisis. Faktor tersebut adalah paradigma yang dijadikan acuan dalam membuat sebuah kebijakan. Faktor paradigma lah yang dirasa menjadi faktor paling berpengaruh, hal ini dikarenakan lewat paradigmalah timbul berbagai pandangan yang membawa manusia pada berbagai macam tindakan dalam berelasi dengan alam. Dalam hal ini paradigma antroposentrisme merupakan salah satu paradigma besar yang mempunyai pengaruh besar pula dalam krisis lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan cara pandang yang memusatkan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Dimana manusia menjadi tidak mempunyai batasan dalam mengeksploitasi alam, dan hal ini pula yang merugikan manusia dan juga lingkungannya.

2.1 Keterarahan Terhadap Paradigma Antroposentrisme

Dalam perkembangannya ada beberapa cara berpikir atau paradigma yang selama ini mengarahkan manusia pada cara berpikir antroposentrisme. Dimana pada abad ke-17 dan abad ke-18 cara pandang ilmu pengetahuan bersifat sekular, mekanistik, dan juga reduksionistik. Pendekatan mekanistik- reduksionistik merupakan faktor dari lahirnya pemikiran antroposentrisme. Cara pandang mekanistik-reduksionistik merupakan warisan dari pemikiran barat, dimana pemikiran ini berkembang pada abad ke-17 dan ke-18. Ada pun filsuf-filsuf yang mempunyai pengaruh dalam paradigma mekanistik reduksionistik adalah Immanuel Kant (rasional empiris), Francis Bacon (pengetahuan adalah kuasa), Galileo Galilei, Rene Descartes (dualisme cartesian), Max Weber (etika kerja protestan) dan juga Isaac Newton.

Dalam pemikiran cartesian kita mengetahui bahwa ada pemisahan antara tubuh dan jiwa, hal inilah yang membawa pemikiran kita bahwa antara manusia dengan alam itu terpisah. Tidak ada keterkaitan antara alam dan manusia. Manusia

dipandang sebagai makhluk yang dapat menentukan sikap mereka lewat rasio, sedangkan binatang bertindak layaknya sebuah mesin. Dalam hal ini manusia lebih diutamakan dan dianggap mempunyai nilai pada dirinya sendiri, sementara alam hanya dianggap sebagai alat atau objek bagi pendukung kepentingan manusia belaka.

Keterarahan pemikiran cartesian memberikan dampak yang cukup luas, baik itu dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi manusia berelasi dengan alam. Jika dilihat memang pada masa modern perkembangan teknologi terus berkembang pesat dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Revolusi muncul dimana-mana, perkembangan industri yang mengarahkan kearah perekonomian berkelanjutan dan juga kapitalisme yang terus membayang-bayangi kehidupan manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kuasa dalam kehidupan manusia. Fritjof Capra menyatakan bahwa barat selama ini hanya mengukur kemajuan dengan rasionalitas atau intelektualitas. Walau banyak kenikmatan hidup yang telah dicapai, namun kemajuan yang melulu rasional dan intelektual ternyata menghasilkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum (Widianarko, dkk 51). Manusia pada masa modern tidak lagi mengenal adanya nilai yang membatasi mereka dalam bertindak. Manusia lebih mengedepankan rasionalitas sebagai dasar kebijakan yang diambil. Hal inilah yang menimbulkan perilaku manusia yang manipulatif dan eksplotatif terhadap alam yang akhirnya berujung pada krisis lingkungan atau kerusakan lingkungan secara perlahan-lahan.

Dengan cara pandang mekanistik/cartesian maka implikasi yang didapat adalah adanya paham antroposentrisme. Dalam hal ini Jurgen Habermas memberikan penolakan terhadap filsafat modern yang dipelopori oleh Descartes yang disebutnya sebagai filsafat kesadaran atau *philosophy of consciousness* yang berpusat pada subjek. Rasionalitas yang dimunculkan oleh filsafat kesadaran adalah rasionalitas instrumental, yakni rasionalitas yang bekerja berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh subjek yang berpikir. Dengan cara ini lah subjek yang berpikir akan menganggap berbagai hal diluar pikirannya sebagai objek pasif yang menunggu dikerjakan. Bagi Habermas, filsafat model ini hanya

menghasilkan objektivisme dan positivisme yang pada gilirannya menghasilkan dehumanisasi dan kerusakan lingkungan (Widianarko, dkk 51).

Ada pun bentuk pemikiran mekanistik/cartesian dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan (Keraf 268)

Cara pandang mekanistik/ cartesian
Intinya : <i>mekanistik, reduksionistis, objektivitas, teknokratis</i>
<p><i>Ciri-ciri utama</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakta dan nilai tidak berhubungan 2. Etika dan kehidupan sehari-hari terpisah 3. Subjek dan objek terpisah 4. Manusia dan alam terpisah antara manusia dan alam adalah relasi dominasi 5. Ilmu pengetahuan bebas nilai, dipilah-pilah, empiris, menguasai 6. Menganut konsep linear tentang waktu dan sebab akibat 7. Alam dipahami sebagai terdiri dari bagian-bagian yang lepas; keseluruhan tidak lebih dari kumpulan seluruh bagiannya 8. Yang ditekankan adalah aspek kuantitatif 9. Yang ditekankan adalah realitas material 10. Analisis adalah kunci untuk memahami 11. Yang ditekankan adalah nilai instrumental 12. Sedikit atau tidak mengenal batas teknis atau ekologis
<p><i>Ciri sekunder</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentralisasi kekuasaan 2. Spesialisasi 3. Menekankan kompetisi 4. Meningkatkan hegemonitas dan disintegrasi 5. Pertumbuhan ekonomi tidak terdiferensiasi

Sedangkan dalam pemikiran Immanuel Kant dalam hubungan antara manusia dengan alam ia menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional diperbolehkan secara moral untuk menggunakan makhluk lainnya sebagai

penunjang hidup manusia itu sendiri. Hal ini didasarkan atas perbedaan makhluk rasional dan makhluk yang tidak menggunakan rasio sebagai landasan hidupnya. Jelas implikasi yang dihasilkan dari pemikiran Immanuel Kant adalah tidak adanya tanggung jawab moral terhadap makhluk di luar manusia. Makhluk di luar manusia disini adalah istilah untuk menjelaskan entitas lain yang tidak menggunakan rasio atau makhluk yang tidak mempunyai akal budi. Entitas diluar manusia dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia belaka.

Dari pemikiran modern yang berlandaskan pada pemikiran yang rasional jelas dampak yang diperoleh adanya rasa superioritas dari manusia khususnya dalam relasi manusia dengan alam. Manusia tidak lagi melihat alam sebagai suatu kesatuan dengan manusia, melainkan alam dipandang sebagai sesuatu yang terpisah. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya eksploitasi besar-besaran terhadap alam.

Selain sisi rasional yang menjadi dasar atau landasan untuk menentukan sikap moral terhadap alam, ada sisi lain yaitu sisi teologi. Sisi teologi disini dipengaruhi oleh pemikiran teologi Kristen. Menurut Lynn White Jr pandangan teologi Kristen yang mempunyai tendensi antroposentrisme adalah dalam kitab Kejadian 1: 26 & 28 (*Genesis* 1:26 & 28). (Kejadian 1:26 & 28) bertuliskan:

- Kejadian 1: 26 Berfirmanlah Allah : “ Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
- Kejadian 1: 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

Kata yang menjadi perdebatan dan acuan bagi manusia untuk menjadi yang paling superior adalah kata berkuasa dan taklukkanlah. Kedua kata inilah yang kemudian menjadi dasar manusia bahwa manusia berhak untuk menaklukkan alam dan berkuasa atas alam yang berujung pada paradigma antroposentrisme.

2. 2 Antroposentrisme

Secara etimologis Antroposentrisme tersusun dari dua kata bahasa Yunani yaitu "*antropos*" yang berarti manusia dan "*centrum*" yang berarti pusat. Jadi dalam hal ini antroposentrisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa manusia adalah pusat dari segala aktivitas di alam semesta. Maka itu segala sesuatu yang ada didalam alam harus sedapat mungkin digunakan demi kebaikan dan kemakmuran manusia. Pertimbangan moral yang ada pada cara pandangan antroposentrisme adalah didasarkan pada nilai kepentingan manusia belaka. Hal inilah yang membawa dampak buruk dalam relasi manusia dengan alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai pada dirinya sendiri melainkan hanya di lihat berdasarkan pada nilai instrument belaka atau nilai kegunaannya belaka.

Pemikiran antroposentrisme dapat disimpulkan menjadi beberapa pokok atau dasar landasan pemikiran, antara lain :

1. Manusia terpisah dari alam dan tidak menjadi bagian dari alam
2. Dalam permasalahan hak, antroposentrisme lebih mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam
3. Manusia lebih mengutamakan perasaan sebagai pusat keprihatinannya melihat alam jika terjadi kerusakan terhadap alam
4. Mengambil kebijakan dan pengaturan sumber daya alam didasarkan pada kepentingan manusia belaka, tanpa mempunyai tanggung jawab moral terhadap alam sebagai sesuatu yang bernilai dan mempunyai keterkaitan dengan manusia
5. Dilihat dari cara pengambilan kebijakan, antroposentrisme lebih mengutamakan rencana atau keputusan yang mempunyai jangka pendek atau bersifat lebih cepat
6. Arah yang diambil dalam pengambilan kebijakan dalam antroposentrisme adalah perhitungan mengenai untung atau rugi yang akan didapat dalam mengambil sebuah kebijakan
7. Dalam pemikiran antroposentrisme, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dari kesejahteraan manusia.

Jika paradigma antroposentrisme dikaitkan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan maka arah yang dituju adalah pembangunan yang berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi belaka. Hal inilah yang mengkhawatirkan karena dengan melihat satu aspek saja, yaitu ekonomi, hal ini akan memberikan peluang besar bagi manusia untuk terus-menerus menggali hasil bumi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tiap-tiap negara.

2.3 Antroposentrisme dan Pembangunan

Pada dasarnya manusia hidup saling berelasi, hal ini dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam relasinya, manusia berelasi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara manusia itu berelasi dengan lingkungannya dikaitkan dengan pembangunan yang menuntut manusia untuk terus berkembang dan maju. Jika dilihat melalui paradigma antroposentrisme relasi manusia dengan alam adalah relasi yang mempunyai tingkatan. Dimana tingkatan disini adalah bentuk superioritas manusia sebagai makhluk rasional menguasai alam dan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Alam ini hanya dilihat sebagai objek dan manusialah subjek yang menentukan sebuah kebijakan.

Dalam pandangan antroposentrisme alam ini patut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal inilah yang memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan pembangunan secara bebas tanpa ada batasan nilai. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan paradigma antroposentrisme merupakan paradigma yang diorientasikan pada keuntungan manusia belaka, baik itu berupa materi maupun nonmateri. Pembangunan jika dikaitkan dengan paradigma antroposentrisme, maka prinsip pertama yang harus dicapai adalah kepentingan manusia. Hal ini jelas terlihat dalam inti pemikiran antroposentrisme yang mengatakan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta ini dan hanya manusialah yang dijadikan sebagai pertimbangan moral dalam mengambil sebuah kebijakan (Amstrong, Botzler 275). Dalam paradigma antroposentrisme, arah pembangunan tidak lagi dilihat dari sisi kepentingan vital manusia melainkan sudah dimonopoli menjadi kepentingan manusia belaka dan tidak lagi melihat

nilai-nilai yang ada pada alam itu sendiri, dimana manusia sebenarnya merupakan bagian dari alam.

Selain tidak berpegang pada kebutuhan vital manusia, pembangunan dalam paradigma antroposentrisme juga lebih mengedepankan gaya hidup yang menuntut standar material, dan tidak lagi menuntut kualitas kehidupan itu sendiri. Arne Naess dalam teorinya menekankan bahwa krisis lingkungan yang terjadi, pembangunan berkelanjutan yang melenceng, dikarenakan gaya hidup manusia yang sangat konsumtif dan tidak ramah lingkungan. Semua arah pembangunan diarahkan pada kemudahan manusia belaka, efisiensi, tuntutan materi, dan persaingan ekonomi yang menuntut manusia berusaha mendapatkan lahan dimuka bumi untuk diolah semaksimal mungkin.

Melihat arah yang dituju dari pembangunan yang didasarkan pada prinsip antroposentrisme, maka alam ini tidak akan bertahan lama. Hal ini dikarenakan tuntutan manusia yang terus-menerus datang hanya untuk memenuhi nafsu materi belaka atau sebagai gaya hidup yang berlebih. Manusia tidak lagi mempunyai rasa hormat terhadap alam / *respect for nature*, melainkan manusia hanya menanamkan persaingan antara manusia untuk menaklukan alam ini dan sekedar mencari keuntungan belaka dalam kehidupan ini.

Manusia tidak lagi memegang prinsip *nonmaleficence* (*nonmaleficence* merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam prinsip *respect for nature* Paul Taylor), dimana dalam prinsip ini manusia mempunyai kewajiban untuk tidak memberikan kerugian kepada alam. Kerugian disini adalah berupa pengrusakan habitat alamiah alam itu sendiri. Sebagai contoh kasus yang memperlihatkan keserakahan manusia yang berujung bencana adalah sebagai berikut:

1. Penebangan hutan yang dilakukan secara illegal. Dimana fungsi hutan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencematan udara seperti CO₂ (karbon dioksida) dan CO atau karbon monoksida (Syadiashare, para 10). Dengan adanya penebangan liar maka hutan tidak lagi secara maksimal dapat menyerap air yang ada, jelas hal ini membawa bencana bagi manusia berupa banjir yang datang ketika musim hujan pun datang.

2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan mobil ditiap tahunnya. Hal ini turut mempercepat kerusakan lingkungan yang dikarenakan jumlah karbon yang terus meningkat. Dengan meningkatnya jumlah karbon maka lapisan ozon terus menipis. Hal inilah yang membawa dampak pada pemanasan global, efek rumah kaca, kondisi alam yang tidak menentu.
3. Perburuan satwa langka yang dilindungi dan pencurian terumbu karang secara paksa turut memberikan ketidakseimbangan bagi ekosistem. Dalam hal ini tidak akan ada lagi keanekaragaman hayati (*loss of biodiversity*), manusia akan dirugikan karena alam tidak lagi dapat berkembang sesuai dengan habitatnya.
4. Tingkat pertumbuhan penduduk yang diluar batas. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula jumlah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh alam. Hal ini lah yang mengakibatkan alam tidak lagi seimbang dikarenakan semakin berkurangnya ruang untuk alam berkembang sesuai dengan kondisi alamiahnya.

Dengan tetap berpegang pada paradigma seperti ini, antroposentrisme, maka bumi tidak akan mempunyai umur yang panjang. Hal ini dikarenakan bumi ini terus-menerus dieksploitasi dan digunakan tanpa adanya keseimbangan dari manusia untuk menutupi kekurangan yang terjadi *restitutive justice*. *Restitutive justice* adalah sebuah kewajiban yang mengharuskan manusia mengembalikan kondisi alam yang telah dirusak. Kalau pun ada tindakan manusia yang berusaha untuk menutupi kerusakan atau kepunahan yang terjadi dengan karantina atau pelestarian, hal itu sebatas untuk kepentingan manusia itu sendiri dan jangka waktunya pun bersifat sementara. Manusia tidak lagi mempunyai tanggung jawab moral terhadap alam, melainkan alam dinilai sebagai objek mutlak yang tidak mendapatkan perhatian moral secara khusus.

Di dalam perkembangannya antroposentrisme mendapatkan beberapa kritik. Hal ini dikarenakan antroposentrisme merupakan jalan untuk menuju kerusakan lingkungan dan jalan bagi manusia untuk memberikan wewenang menggunakan alam tanpa batasan nilai. Ada dua paradigma yang mengkritik cara pandang antroposentrisme, yaitu paradigma biosentrisme dan ekosentrisme. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk

sosial. Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Etika ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan (“Komunitas embun pagi”).

2. 4 Kritik Terhadap Antroposentrisme

2. 4. 1 Biosentrisme

Biosentrisme merupakan bentuk perlawanan terhadap pandangan antroposentrisme. Biosentrisme secara etimologis mempunyai arti *bio* adalah hidup dan *sentrisme* adalah pemusatan, jadi biosentrisme adalah pemusatan pada kehidupan. Tokoh dalam biosentrisme yang mempunyai pengaruh besar adalah Albert Schweizer. Dalam teorinya *The life centered theory*, Albert Schweizer mengemukakan bahwa ada empat pokok prinsip etis, yaitu (Aprillins para 4) :

1. Manusia adalah anggota dari komunitas hidup yang ada di bumi
2. Bumi adalah suatu sistem organik dimana manusia dan ciptaan lain saling berkaitan dan bergantung satu sama lain
3. Setiap ciptaan dipersatukan oleh tujuan bersama demi kebaikan dan keutuhan keseluruhan
4. Menolak superioritas manusia dihadapan makhluk lain

Lewat empat prinsip etis inilah maka ada sebuah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Dalam hal ini bentuk penghormatan kehidupan tidak hanya sebatas pada manusia saja, melainkan pada semua macam kehidupan yang ada. Dalam hal ini ada prinsip atau perintah moral yang berbunyi “ adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya buruk kalau kita menghancurkan kehidupan” (Amstrong, Botzler 52).

Dalam pandangan biosentrisme dipandang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri atau nilai instrinsik. Jika diartikan ke dalam permasalahan konkret manusia nilai instrinsik disini diibaratkan seperti masalah hak asasi manusia atau HAM. Dalam hal ini nilai instinsik disini bukan tergantung pada manusia melainkan sudah melekat pada tiap makhluk hidup. Oleh karena itu, bukan hanya manusia yang

memiliki hak untuk berada, tetapi alam juga mempunyai hak untuk berada. Manusia dalam konteks biosentrisme merupakan bagian dari kesatuan alam, dalam artian manusia tidak terpisah dari alam seperti dalam pandangan antroposentrisme. Dalam konteks ini, biosentrisme merupakan sebuah komunitas moral, dimana semua bagian dari komunitas itu memiliki nilai moral. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan antroposentrisme yang meletakkan nilai moral hanya pada manusia saja.

Pandangan biosentrisme mengenai hak juga lebih terbuka dibandingkan dengan prinsip antroposentrisme. Dalam permasalahan hak, antroposentrisme lebih mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam. Hal ini yang membedakan dengan biosentrisme yang meletakkan prinsip hormat terhadap alam/ *respect for nature* dan menghargai alam sebagai entitas yang bernilai. Seperti yang di jelaskan Taylor tentang menghormati alam. Bagi Taylor ada empat kewajiban sebagai wujud sikap hormat terhadap alam, yaitu (172) :

1. Kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian bagi alam (*rule of nonmaleficence*)
2. Prinsip yang mengharuskan manusia menghormati kondisi alam yang alami tanpa ada campur tangan manusia yang dapat merugikan entitas lain (*rule of noninterference*)
3. Adanya sebuah komitmen untuk memberikan kebebasan bagi alam, dan tidak memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia belaka (*rule of fidelity*)
4. Kewajiban yang mengharuskan manusia mengembalikan kondisi alam yang telah dirusak (*rule of restitutive justice*)

Jelas dengan memberikan penghormatan terhadap alam maka alam ini akan coba dihargai sebagai entitas yang mempunyai hak untuk berkembang secara alamiah dan tidak melihat alam sebagai alat atau instrument untuk kepentingan manusia belaka. Semua makhluk hidup dalam biosentrisme adalah anggota dari komunitas hidup, dalam arti bahwa setiap ciptaan berhak diperlakukan dengan baik secara moral. Manusia sebagai pelaku atau subjek moral harus

memperlakukan dengan baik dan tanggung-jawab moral terhadap makhluk lainnya.

Pemikiran biosentrisme ini merupakan bentuk dari perlawanan terhadap antroposentrisme yang selama ini dianggap sebagai akar masalah kerusakan lingkungan. Dalam paradigma biosentrisme terlihat jelas perbedaan yang mencolok dengan antroposentrisme. Dimana dalam biosentrisme yang menjadi pusat pertimbangan adalah kehidupan, sedangkan antroposentrisme manusia lah yang menjadi pusat alam semesta. Biosentrisme sebenarnya ingin memberikan pandangan baru bahwa alam ini harus dihargai dan dihormati sebagai entitas yang mempunyai nilai. Dengan adanya penghormatan terhadap alam, maka arah kebijakan tidak lagi memperhitungkan untung rugi atau bersifat materialistis seperti dalam antroposentrisme. Melainkan arah kebijakan dalam biosentrisme adalah pembangunan yang menghargai tiap makhluk sebagai entitas yang bernilai dengan tetap berpikir maju dan berkembang.

- Dasar atau landasan dari pemikiran biosentrisme
 - Adanya sebuah kewajiban terhadap alam dengan landasan bahwa kehidupan mempunyai nilai yang penting, baik itu manusia maupun tumbuhan dan binatang dalam hal ini mempunyai nilai kehidupan
 - Melihat alam dan seluruh isinya mempunyai nilai dalam dirinya sendiri atau nilai instrinsik dan sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dari tiap makhluk yang ada
 - Tidak ada pandangan yang bersifat hierarki. Dalam hal ini manusia dengan makhluk lain mempunyai hak yang sama dan manusia tidak dianggap sebagai superior diantara makhluk lainnya
 - Pusat teori biosentrisme adalah pada komunitas bioeris dan seluruh kehidupan di bumi
 - Memberikan pertimbangan moral pada tiap makhluk. Dalam hal ini ada rasa hormat terhadap alam/ *Respect for nature*

2 . 4. 2 Ekosentrisme / *Deep Ecology*

Ekosentrisme merupakan perluasan dan kelanjutan dari paradigma biosentrisme. Ekosentrisme juga dikenal dengan sebutan DE atau *deep ecology*. *Deep Ecology* diperkenalkan pertama kali oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, di tahun 1973. Dalam pandangan ekosentrisme lebih memperluas pandangan moral. Dimana dalam pandangan ekosentrisme perlu adanya pemahaman bahwa adanya keterkaitan antara manusia dengan makhluk lain dan juga benda-benda abiotis lainnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang saling menopang antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Cara pandang ekosentrisme adalah cara pandang yang mendobrak cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia (Keraf 75-76). Ekosentrisme dalam konteks ini merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa baik komunitas biologis yang hidup maupun yang mati saling berkaitan satu sama lain. Air, udara, cahaya, tanah dan lain sebagainya sangat menentukan kualitas komunitas biologis. Selain adanya keterkaitan antara manusia dengan makhluk lainnya, manusia juga mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab moral pada makhluk lainnya.

Hal yang baru dari DE adalah pertama tidak lagi melihat kepentingan manusia sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Tentunya implikasinya adalah adanya sebuah tatanan baru dan pertimbangan moral yang lebih luas dibandingkan dengan prinsip antroposentrisme. Perencanaan yang ada pada prinsip DE adalah perencanaan jangka panjang dan lebih bersifat mengubah gaya hidup yang lebih melihat aspek ekologis dan kesatuan manusia dengan lingkungannya. Kedua, dalam DE ada sebuah gerakan baru dalam bentuk nyata, dan bukan hanya berlandaskan pemahaman belaka. Hal ini lah yang tertuang dalam bentuk *ecosophy*. Gerakan baru ini lah yang membentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia khususnya cara manusia berelasi dengan alam, yang selama ini telah salah dan membawa manusia pada krisis lingkungan. DE tidak lagi memandang alam ini sebatas pada alat, melainkan melihat alam ini sebagai bagian yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini DE juga tidak memberikan peluang bagi manusia untuk menjadi penguasa alam, melainkan meletakkan manusia sebagai entitas yang mempunyai keterkaitan dengan alam.

Dalam pandangan DE ada yang disebut dengan *Biospheric egalitarianism*. *Biospheric egalitarianism* yaitu pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Bagi Naess hak semua makhluk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Hal ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap alam yang selama ini dipandang sebagai instrument belaka dalam pandangan antroposentrisme. Dimana antroposentrisme melihat alam sebatas objek yang memberikan manfaat dan tidak meletakkan alam sebagai sesuatu yang mempunyai nilai. Pemahaman tentang *Biospheric egalitarianism* tidak harus dipahami secara kaku. Pengertian yang kaku disini adalah pengertian yang menerima bahwa manusia dengan makhluk lainnya itu sama mutlak dalam segala hal. Melainkan kita harus memahaminya sebagai penghormatan terhadap entitas lain sebagai makhluk yang mempunyai nilai instrinsik. Seperti juga yang ada dalam perspektif DE, dimana tiap makhluk itu mempunyai nilai yang independen dan tidak tergantung dari luar. Hal ini jelas mengarahkan kita untuk meletakkan bahwa makhluk diluar manusia juga mempunyai hak untuk hidup.

Dari pandangan baru mengenai nilai instrinsik alamlah manusia baru mau mengakui akan adanya hak alam. Hak alam disini adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap alam yang selama ini hanya dipandang sebagai instrument dalam kehidupan manusia. Hak alam dalam disini sangat diperlukan untuk memberikan batasan bagi manusia untuk tidak begitu saja menggunakan alam. Naess juga menyebutkan bahwa gaya hidup menjadi dasar yang penting untuk menuju keseimbangan ralsasi antara manusia dengan alam. Dimana selama ini krisis ekologi yang terjadi dikarenakan arah kebijakan pembangunan hanya dikaitkan dengan tingkat ekonomi. Dimana permasalahan yang timbul adalah adanya persaingan produksi. Manusia menjadi konsumtif, dimana kebutuhan yang tidak lagi mendesak dijadikan sebuah prioritas dalam kehidupan ini.

**Perbedaan Cara Pandang Antara Antroposentrisme dengan Ekosentrisme/
*Deep Ecology***

Keterangan	Cara pandang Antroposentrisme	Cara pandang ekosentrisme / <i>deep ecology</i>
Dasar acuan	Manusia	Ekosistem
Titik tolak terhadap nilai intrinsik	Tidak mengakui adanya nilai pada alam, dalam antroposentrisme alam hanya dipandang sebatas nilai kegunaan atau instrumen belaka.	Mengakui adanya nilai intrinsik pada tiap makhluk, alam tidak dipandang sebagai instrument melainkan sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri
Hubungan manusia dengan alam	Manusia terpisah dengan alam, relasi manusia sebatas relasi sosial dengan manusia lainnya	Manusia merupakan satu kesatuan dengan alam. Dalam hal ini ada jaringan kehidupan yang saling berkaitan antara manusia dengan lingkungannya.
Tujuan Prinsip	Menyejahterahkan kehidupan manusia belaka	Memberikan pandangan menyeluruh bahwa manusia merupakan bagian dari alam, maka dari itu perlu adanya perubahan gaya hidup yang lebih harmonis dengan alam
Pengakuan terhadap hak alam	Tidak mengakui adanya hak alam	Adanya pengakuan akan adanya hak alam

BAB 3

HAK ALAM

Pertanyaan yang muncul ketika kita mempermasalahkan masalah hak alam adalah, apakah yang membedakan antara hak yang dimiliki oleh manusia dengan hak alam itu sendiri? Dalam pembahasan mengenai hak alam disini, akan dibahas mengenai apakah alam itu berhak mempunyai hak yang patut dihargai oleh manusia sebagai makhluk rasional, atautkah alam itu hanya sebatas benda/instrument yang seperti dalam pemikiran antroposentrisme.

Jika dilihat dari konsep dasar pemikiran mengenai cara pandang manusia dan alam maka ada dua pembagian yang mendasar mengenai apakah alam mempunyai hak atau tidak. Kedua konsep tersebut adalah :

1. Antroposentrisme, tidak mengakui adanya hak alam secara khusus. Hanya manusia yang mempunyai hak, hal ini dikarenakan hanya manusia yang mempunyai rasio.
2. Biosentrisme dan Ekosentrisme, melihat bahwa alam ini mempunyai hak. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia dengan alam itu mempunyai keterkaitan dan manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati alam sebagai entitas yang mempunyai nilai dan kegunaannya sendiri. Dalam biosentrisme sendiri masih terdapat perdebatan mengenai hak alam itu sendiri. Sedangkan dalam ekosentrisme secara tegas menyebutkan bahwa alam ini mempunyai hak dan patut dihormati sebagai entitas yang mempunyai nilai instrinsik pada dirinya sendiri.

3. 1 Hak Alam

Melihat dua pembagian mengenai cara pandang manusia mengenai alam, maka dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendasaran kedua pemikiran di atas mengenai hak alam secara sepsifik dan jelas. Secara mendasar antroposentrisme telah menegaskan bahwa alam ini hanya lah sebagai alat atau sebagai instrument belaka. Jika melihat pemikiran Descartes yang melihat bahwa makhluk diluar manusia itu hanya sebagai mesin yang sudah digerakkan "*Animals are*

Machines” (Amstrong, Botzler 281). Descartes mendasarkan pemikirannya pada pandangan bahwa hanya manusia yang mempunyai hak dalam kehidupannya di bumi.

Sedangkan Imanuel Kant, dengan tegas menolak dan ketidakpercayaannya dengan *respect* atau sikap hormat kepada hewan. Hal ini dikarenakan hewan tidak memiliki otonomi atau kesadaran diri, maka tidak dapat menjadi pelaku moral *”moral agents”* . Bagi Kant, kewajiban moral dan hak moral hanya untuk manusia sebagai pelaku moral. Sebagai objek moral, hewan, tidak memiliki akal budi sehingga tidak dapat menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk secara moral. Dalam pendapat Immanuel Kant jelas bahwa makhluk diluar manusia khususnya hewan dan tumbuhan tidak dapat dikategorikan mempunyai hak moral, hewan hanya dipandang sebagai pendukung kehidupan manusia belaka.

Berangkat dari pemikiran Aldo Leopold mengenai etika bumi/ *land ethic*. Dimana dalam etika bumi dijelaskan bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari alam ini, dan manusia juga harus menghormati alam sebagai sesuatu yang mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Klaim nilai pada alam ini diutarakan Leopold untuk melawan pendapat dari pendekatan mekanistik. Dimana dalam pendekatan mekanistik cenderung memperlakukan “bumi” dan alam semesta ini sekedar “benda mati “ padahal ekologi mengajarkan kita bahwa bumi ini memberi kehidupan dan penuh dengan kehidupan, paling kurang berupa organisme hidup (Keraf 60 ; Jardins 190).

Manusia tidak lagi dibenarkan untuk melihat alam ini berdasarkan kepemilikan, lalu manusia berdasarkan kepemilikan dapat mengolah atau pun mengeksploitasi alam ini berdasarkan kepemilikan. Dalam hal ini Leopold memberikan gambaran bahwa alam ini mempunyai hak untuk tetap berkembang secara alamiah tanpa ada campur tangan manusia yang dapat merugikan alam ini. Permasalahan moral tidak lagi sebatas pada tingkatan manusia dengan manusia saja, melainkan sudah pada tingkatan manusia dengan lingkungannya. Leopold pada dasarnya meletakkan prinsip pada integritas, stabilitas, dan juga keindahan. Ketiga hal tersebut merupakan kunci untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini jelas bahwa Leopold

meletakkan prinsipnya dengan melihat bahwa alam ini mempunyai hak untuk tetap berkembang secara alamiah.

Jhon Passmore dalam menanggapi persoalan mengenai apakah entitas lain selain manusia mempunyai hak atau tidak, ia hanya melihat berdasarkan "*reciprocity assumption*". *Reciprocity assumption* disini adalah cara pandang yang melihat adanya hubungan timbal balik dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan permasalahan hak, maka tumbuhan dan binatang tidak mempunyai kewajiban moral sehingga tidak mempunyai hak karena tidak ada hubungan timbal balik antara manusia dengan tumbuhan dan juga binatang.

Cara pandang diatas tentu menghasilkan berbagai macam perdebatan yang tentu saja terbuka untuk diperdebatkan. Hal ini dikarenakan dalam klaim hak asasi ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan posisi hak itu sendiri. kedua pertimbangan itu adalah :

1. Permasalahan mengenai masalah kesadaran untuk menuntut hak untuk dihargai dan dihormati, dalam hal ini hanya manusia yang mempunyai kesadaran dan kebebasan, karena hanya manusialah makhluk yang rasional.
2. Permasalahan hak selalu dikaitkan dengan adanya hubungan timbal balik atau resiprositas. Dalam hubungan timbal balik disini diharapkan adanya rasa saling menghargai satu sama lain.

Dari pertimbangan mengenai hak diatas, maka jelas kedua hal diatas akan terbentur dengan makhluk non-rasional, makhluk yang tak mempunyai kesadaran dan kebebasan, dan juga hubungan timbal balik yang tidak akan terjadi jika dikaitkan dengan binatang dan tumbuhan.

Konsekuensi logis yang didapat jika kita tetap berpegang pada kedua prinsip diatas untuk menentukan hak. Maka kita akan terbentur pada permasalahan bagaimana kita menentukan status pada janin, bayi, orang cacat, orang gila? Hal ini tentu membingungkan karena kedua prinsip tersebut tidak berlaku untuk diaplikasikan kepada janin, bayi, orang cacat dan orang gila dikarenakan mereka tidak mempunyai akal, dan tentu tidak mempunyai hubungan timbal balik berupa kewajiban moral antar sesama. Maka dari itu kedua prinsip

tersebut coba dikaji dan dicari solusi terbaik untuk menentukan posisi hak pada binatang dan tumbuhan.

Melihat perdebatan diatas sebenarnya arah yang dituju adalah adanya hubungan yang harmonis dan memberi hormat kepada alam ini atau *respect for nature*. Paul Taylor menjelaskan bahwa ada dua pembagian dasar mengenai hak. Pertama adalah hak legal dan yang kedua adalah hal moral (Keraf 109). Dimana hak legal merupakan bentuk dari penghormatan terhadap alam yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dimana dalam hak legal, manusia sebagai pelaku moral mempunyai kewajiban untuk menghormati alam sebagai entitas yang saling berkaitan dan berelasi. Manusia sebagai pelaku moral harus menghormati dan menghargai alam

Bagi Taylor ada empat kewajiban sebagai wujud sikap hormat terhadap alam (172).

1. *The rule of nonmaleficence*
2. *The rule of noninterference*
3. *The rule of fidelity*
4. *The rule of restitutive justice*

Prinsip pertama *nonmaleficence* adalah prinsip yang menekankan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian bagi alam. Pelaku moral "*moral agents*" harus mempunyai sikap kepedulian terhadap alam. Prinsip kedua *noninterference* adalah prinsip yang mengharuskan manusia menghormati kondisi alam yang alami tanpa ada campur tangan manusia yang dapat merugikan entitas lain. Dalam hal ini ada dua kewajiban yang mempunyai keterkaitan dengan masalah campur tangan manusia terhadap alam. Pada dasarnya dalam prinsip kedua ini manusia diwajibkan memberikan keleluasaan terhadap alam untuk berkembang sesuai dengan habitatnya. Campur tangan manusia disini merupakan intervensi yang merugikan, dalam hal ini intervensi yang mengarah kepada kepentingan manusia belaka. Prinsip ketiga mengenai *fidelity* adalah sama seperti kedua prinsip sebelumnya. Dalam *fidelity* diharapkan adanya keseriusan manusia untuk benar-benar menghormati alam lewat "janji" terhadap binatang. Janji disini adalah memberikan kebebasan bagi alam untuk tidak dijebak demi kepentingan manusia. Sedangkan prinsip keempat adalah *restitutive justice* adalah sebuah

kewajiban yang mengharuskan manusia mengembalikan kondisi alam yang telah dirusak. Dalam hal ini prinsip *restitutive justice* menuntut adanya keseimbangan akan kondisi alam. Prinsip ini juga merupakan jalan keluar untuk pelanggaran yang dibuat pada prinsip-prinsip sebelumnya.

Lewat penjelasan Taylor mengenai keempat prinsip diatas. Maka jelas arah yang dituju oleh Taylor dalam menentukan posisi alam kaitannya dengan alam. Posisi Taylor dalam hal ini adalah, Taylor memposisikan alam sebatas pada hak legal. Dimana manusia sebagai makhluk rasional mempunyai suatu kewajiban untuk menghormati alam "*Respect for Nature*". Dengan adanya rasa hormat terhadap alam maka menurut Taylor sudah mengakomodasi tujuan akan hak alam. Jadi bentuk hak yang diajukan oleh Paul Taylor dalam masalah hak alam adalah berupa hak legal.

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas. Dalam *deep ecology* khususnya Arne Naess sebagai pendukung gerakan utama DE¹ dengan tegas membela adanya pengakuan terhadap hak alam. Hal ini didasarkan pada prinsip yang ada pada DE yaitu *biospheric egalitarianisme*. Dalam prinsip ini ada sebuah pengakuan bahwa semua makhluk hidup mempunyai status yang sama. Dalam pengakuan ini menyangkut permasalahan hak. Hak disini merupakan bentuk hak yang universal, dan patut dihargai sebagai bentuk kesatuan manusia dengan alam.

Jadi jelas posisi hak dalam tiga pandangan teori etika lingkungan, dimana antroposentrisme menolak adanya hak asasi pada binatang dan tumbuhan. Hal ini dikarenakan manusia merupakan pusat pembuat segala kebijakan. Alam dalam antroposentrisme hanya dipandang sebagai alat atau instrument belaka jadi tidak memerlukan adanya pengakuan hak pada binatang dan tumbuhan. Alam dalam antroposentrisme juga dipandang tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri (nilai instrinsik)/ *instrinsic value*. Dalam pandangan biosentrisme sedikit berkembang dengan adanya rasa hormat atau "*respect for nature*" yang tumbuh terhadap alam. Dimana dalam biosentrisme alam ini mempunyai hak. Hak disini adalah hak legal. Dimana hak legal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap binatang dan tumbuhan. Dengan adanya perlindungan disini diharapkan adanya sebuah kewajiban manusia untuk tetap hormat dan menghargai alam sebagai entitas yang

¹ DE disini merupakan singkatan dari sebuah gerakan yang dibentuk oleh Arne Naess, yaitu *Deep ecology*.

bernilai pada dirinya sendiri. Sedangkan dalam *deep ecology* hak binatang dan tumbuhan diakui sebagai bentuk prinsip *biospheric egalitarianisme*. Dimana dalam prinsip *biospheric egalitarianisme* diakui bahwa setiap makhluk mempunyai hak dan patut dihargai sebagai entitas yang turut memberikan pengaruh satu sama lain.

Pada dasarnya permasalahan hak adalah permasalahan yang rumit dan sangat mendasar. Hal yang ingin dicapai dalam permasalahan hak alam, (hak binatang dan tumbuhan), disini adalah adanya suatu pembatasan gerak. Pembatasan gerak disini ditujukan kepada manusia yang selama ini telah mengeksploitasi alam secara besar-besaran khususnya dalam pemikiran antroposentrisme. Dengan adanya pengakuan hak terhadap alam, maka manusia tidak akan lagi bertindak sewenag-wenang. Selain pembatasan gerak pada manusia terhadap alam, hal lain adalah ingin memberikan penekanan bahwa alam ini juga mempunyai nilai pada dirinya, dan juga manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri.

Selain untuk memberikan batasan gerak pada manusia, hak alam juga memberikan pemahaman bahwa manusia mempunyai tanggung-jawab terhadap alam. Secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam (Keraf 146). Tanggung-jawab di sini merupakan bentuk dari sebuah kebijakan atau suatu bentuk kearifan yang tetap menjaga dan merawat alam semesta sebagai rumah tinggal manusia itu sendiri. Perwujudan dari rasa tanggung-jawab itu bisa berupa peringatan, larangan, dan hukuman bagi siapa saja yang mengganggu dan merusak alam.

Dengan menerima hak alam sebagai nilai dasar pada prinsip pembangunan berkelanjutan "*sustainable develepment*", maka arah pembangunan akan mengarah pada kebutuhan vital manusia seperti yang diharapkan pada gerakan *ecosophy*. Manusia tidak lagi mengarahkan pandangannya pada prinsip materi, melainkan permasalahan kualitas hidup menjadi akar dari pola pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan yang mendasarkan pada pengakuan adanya hak alam, maka dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan atau sistem yang harmonis dalam kehidupan manusia dengan alam.

3. 2 Keadilan Ekologis

Relasi manusia dengan alam merupakan hal yang mendasar dalam menentukan mau kemana arah kebijakan dalam sebuah pembangunan. Hal yang ingin dituju dari sebuah relasi antara manusia dengan alam adalah adanya hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini kepentingan manusia tidak lagi mendominasi dalam hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak lagi eksklusif dalam berelasi dengan alam. Kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi dikarenakan adanya dominasi kuat dari manusia dalam memenuhi kepentingannya, tanpa melihat alam mempunyai hak untuk dihargai.

Mengingat terbatasnya sumber daya alam yang ada, maka perlu ada sebuah kebijakan baru, dimana kebijakan tersebut mengarahkan kita pada bentuk keharmonisan terhadap alam. Jika mengutip kata Mahatma Gandhi dimana “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak” (Radjimo para 1). Manusia harus mau mengakui bahwa dirinya tidak mungkin hidup sehat tanpa kondisi lingkungan yang sehat pula. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut perlu adanya gerakan untuk mendobrak cara pandang yang selama ini bersifat materialistis yaitu sebuah bentuk keadilan ekologis.

Dengan sifat materialistis dari manusia maka tujuan yang ingin dicapai hanyalah sebatas kepada kepentingan ekonomi belaka. Selama ini manusia hanya mengejar kualitas dari materi dalam kehidupan, tidak melihat aspek dari kualitas hidup manusia itu sendiri. Dengan adanya sifat konsumtif dari tiap-tiap individu maka menimbulkan persaingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Lewat persaingan akan pemenuhan kebutuhan manusia maka manusia terus mengeksploitasi alam untuk memenuhi permintaan akan barang. Alam tidak lagi diberlakukan adil disini, hal ini dikarenakan manusia hanya melihat satu sisi yaitu kepentingan manusia belaka.

Dalam hal ini perlu ada cara pandang yang meletakkan keadilan bagi alam, agar tidak ada lagi pengeksploitasian alam demi mengejar keuntungan belaka. Manusia seharusnya menggunakan alam ini untuk kebutuhan vital manusia belaka. Kebutuhan vital disini adalah berbentuk kesehatan, sandang, pangan,

papan yang layak. *“humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs.”*(Naess 29)

Alam harus diberlakukan adil dikarenakan alam ini mempunyai hak seperti yang diutarakan dalam pembahasan hak alam diatas. Manusia sebagai subjek moral harus mampu mengarahkan kebijakan yang dibuatnya dengan pertimbangan bahwa alam ini patut dihargai karena ia bernilai. Keadilan disini bukan suatu kesamaan nilai seperti *biospheric egalitarianisme* yang kaku, melainkan ada sebuah bentuk penghormatan terhadap alam dan kewajiban untuk menjaga alam. Hal ini dapat dilihat seperti ada hubungan saling keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya. Jika manusia ingin hidup sehat, maka manusia harus menciptakan lingkungan yang sehat pula.

Keadilan ekologis adalah memberikan ruang kepada makhluk lain untuk tetap berkembang secara alami dan memberikan batasan gerak pada manusia untuk menggunakan alam. Dimana manusia memberikan perlindungan terhadap alam dari tangan-tangan yang tidak bertanggung-jawab. Manusia harus sadar bahwa dengan rusaknya lingkungan maka kehidupan manusia akan terganggu pula. Dari sinilah kebijakan akan pembangunan diatur dengan melihat berbagai aspek. Tidak seperti pembangunan yang hanya mengedepankan aspek ekonomi belaka, yang akhirnya melegalkan pengeksploitasian alam dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat tiap harinya.

BAB 4

Pembangunan Berkelanjutan dan *Ecosophy*

Manusia dalam kehidupannya memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam disini dapat berupa air, tanah, udara dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Jika dilihat dari kebutuhan manusia dengan kapasitas alam yang mempunyai keterbatasan, maka diperlukan kebijaksanaan dalam pengolahan sumber daya alam yang ada. Kebijakan pengolahan alam disini dimaksudkan agar terciptanya keseimbangan ekologis. Dengan adanya keseimbangan ekologis maka keberlanjutan ekologis akan tetap ada.

Dengan menyadari bahwa kuantitas dan kualitas dari alam tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang berlebih, maka kebijakan yang diambil haruslah memperhatikan dua sisi. Kedua sisi itu adalah sisi manusia sebagai pembuat kebijakan dan sisi alam sebagai penyedia sumber daya yang juga mempunyai hak untuk dihormati. Manusia dalam hal ini membuat perencanaan akan pola pengembangan sumber daya alam. dimana pola pengembangan sumber daya alam diaplikasikan lewat pembangunan berkelanjutan. Dimana dalam pembangunan berkelanjutan terdapat berbagai aspek sebagai dasar pembentukan kebijakan.

4. 1 Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul pada tahun 1980 dalam *World Conservation Strategy* dari *the International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), lalu pada tahun 1981 dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Sustainable Society* (Keraf 166) Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk kebijakan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan dalam proses pembangunan berkelanjutan berusaha menggabungkan antara sisi ekonomi dan lingkungan. Dimana seperti kita ketahui selama ini pembangunan hanya didorong oleh kepentingan ekonomi belaka, yang akhirnya berujung pada pengeksploitasian alam secara bebas. kedua hal diatas, ekonomi dan ekologi, merupakan dasar kebijakan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan (Keraf 167).

Dalam proses pembangunan berkelanjutan ada tiga aspek penting di dalamnya. Ketiga aspek ini mempunyai keterkaitan untuk membentuk keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kebutuhan alam. Ketiga aspek tersebut adalah, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

1. **Keberlanjutan ekonomi**, dapat dimengerti sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam yang ada. Dimana aspek ekonomi juga harus dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan vital manusia, bukan semacam persaingan dagang yang berujung pada bentuk materialistik dan hedonistik. Perlu adanya efisiensi dalam penggunaan alam sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan alam sebagai entitas yang bernilai dan mempunyai hak.
2. **Keberlanjutan sosial**, merupakan bentuk kesederhanaan dari sebuah pembangunan yang kaya akan makna kehidupan. Dalam keberlanjutan sosial disini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Dimana di dalamnya bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial, pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, politik dan lain-lain.
3. **Keberlanjutan lingkungan**, merupakan alat kontrol dalam sebuah pembangunan berkelanjutan. Dimana pemerintah berusaha memberikan kestabilan akan penggunaan sumber daya alam dan fungsi alam sebenarnya. Dalam konsep ini juga harus terdapat penghargaan terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*), melihat nilai pada alam (*intrinsic value*), dan tetap melihat bahwa manusia ini adalah bagian dari alam.

Jika dilihat dari ketiga aspek diatas maka arah dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah sebuah keharmonisan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan alam sebagai entitas yang bernilai. Konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai hubungan erat dengan masalah etika dan politik. Hal ini dikarenakan ada konflik kepentingan antara manusia dengan alam. Dimana manusia ingin tetap dapat bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya alam yang ada, sementara alam juga ingin tetap hidup sebagai entitas yang bernilai pada dirinya sendiri. Dalam hal politik ada sebuah keputusan yang diambil pemerintah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Keputusan ini harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tetap memperhatikan kedua aspek yang ada, baik itu alam maupun manusia.

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan atau *deep ecology* dan bukan pandangan anthroposentrisme. Pandangan etika lingkungan, ekosentrisme, tersebut di jadikan dasar untuk membuat sebuah kebijakan oleh pemerintah. Adapun beberapa pandangan ekosentrisme yang dijadikan dasar sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah adalah :

1. Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*). Sikap ini merupakan sikap yang mendasar dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Karena dengan mengedepankan sikap hormat terhadap alam maka kita akan meletakkan hak alam sebagai dasar kebijakan yang dibuat. Dengan sikap hormat pula maka tidak akan ada lagi bentuk-bentuk eksploitasi alam demi kepentingan manusia belaka.
2. Prinsip tanggung-jawab (*moral responsibility for nature*). Tanggung-jawab disini adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan manusia sebagai subjek moral. Manusia mempunyai kewajiban untuk melestarikan alam ini sehingga alam ini tidak lagi rusak dan digunakan secara salah. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang terhadap alam untuk dapat berkembang sesuai dengan habitatnya.
3. Prinsip *no harm*. Dalam prinsip ini kita harus melihat entitas lain sebagai makhluk yang bernilai, kita tidak boleh merugikan alam. Hal ini

dikarenakan alam ini juga patut dihargai dan patut untuk mendapatkan kebebasan untuk berkembang biak sesuai dengan habitatnya.

4. Prinsip demokrasi. Dalam prinsip ini ada keterbukaan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan.
5. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dalam prinsip ini ada sebuah gaya hidup baru seperti dalam gerakan *ecosophy* yang mengedepankan kualitas hidup dibandingkan nilai materi sehingga menuju pada keselarasan hubungan manusia dengan alam. Manusia dalam hal ini tidak lagi mengedepankan nilai materi, melainkan kualitas dari kehidupan yang menjadi dasar pertimbangan.
6. Prinsip keadilan. Keadilan disini adalah bentuk pelestarian alam dimana manusia harus melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai sehingga tidak lagi melihat alam sebatas instrument belaka. Manusia harus memberikan ruang bagi alam untuk tetap berkembang, dan tetap pada prinsip bahwa alam ini digunakan sebatas kepentingan vital manusia.
7. Prinsip integritas moral. Dalam hal ini adanya kesatuan pandangan manusia mengenai pandangan moral dalam berinteraksi dengan alam. Pandangan disini adalah adanya prinsip bahwa manusia dengan alam itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain.

Dengan prinsip-prinsip etika diatas maka jelas bahwa alam ini bukan sekedar instrument saja, melainkan entitas yang bernilai, mempunyai hak dan saling mempunyai pengaruh satu sama lain. Orientasi pembangunan tidak lagi mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melainkan keberlanjutan ekologis. Hal ini lah yang membedakan pola pembangunan yang didasarkan pada aspek ekonomi dengan pembangunan yang mengedepankan kesatuan ekologis sebagai bentuk pembangunan.

4. 2 Arah Etika Lingkungan Dalam Pembangunan

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan turut membawa manusia pada kemajuan. Kemajuan tersebut dapat berupa kemajuan teknologi dan kemajuan peradaban bagi manusia. Sedangkan di sisi lain pembangunan juga memberikan dampak negatif yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Dampak negatif ini adalah rusaknya hubungan manusia dengan alam yang berakibat pada bencana bagi manusia itu sendiri (bencana alam).

Bencana yang terjadi bukanlah bencana yang datang begitu saja, melainkan ada penyebab utama yang mengakibatkan itu terjadi. Bencana itu terjadi dikarenakan hubungan manusia dengan alam tidak lagi harmonis. Manusia dengan cara pandang antroposentrismenya terus menerus mengeksploitasi alam, dengan alasan manusia adalah pusat dari alam semesta. Tujuan yang dituju pun hanya untuk kesejahteraan umat manusia saja, tidak melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai. Manusia lebih mengedepankan aspek ekonomi sebagai barometer sebuah kemajuan tanpa melihat aspek nilai lain dalam menghitung suatu kemajuan. Nilai materi menjadi dasar kemakmuran, sedangkan kualitas hidup tidak lagi menjadi tujuan utama dari pembangunan.

Manusia dalam cara pandangnya menghilangkan etika dalam bertindak, khususnya dalam berelasi dengan alam. Seperti kita ketahui etika merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam menentukan suatu nilai. Secara etimologi kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang berarti adat kebiasaan. Kata ini memiliki arti yang sama dalam bahasa latin, *mores*, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai moral (Bertens 4-5). Dengan merujuk pada prinsip etika maka penyelesaian ketidakharmonisan manusia dengan alam dapat dilihat berdasarkan konflik kepentingan yang muncul. Konflik disini dapat diartikan sebagai bentuk keegoisan manusia dalam berelasi dengan alam. Manusia dalam hal ini hanya memandang alam sebatas instrument belaka. Hal ini lah yang membuat alam terus menerus dieksploitasi dan tidak dapat berkembang sesuai dengan habitatnya.

Fungsi etika dalam hal ini memberikan paradigma bahwa manusia sebagai pelaku moral (*moral agents*) harus menghargai alam/ *respect for nature* sebagai entitas yang bernilai dan mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Kesalahan

manusia dalam memandang etika adalah, etika hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hal inilah maka alam hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi atau penunjang kehidupan manusia. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, etika lingkungan hidup menuntut adanya perluasan cara pandang dan perilaku moral manusia. Yaitu dengan memasukkan lingkungan atau alam semesta sebagai bagian dari komunitas moral. Hal inilah yang mengarahkan kebijakan, khususnya pembangunan berkelanjutan, sebagai bentuk nyata prinsip-prinsip etika di dalamnya.

Cara pandang lama, antroposentrisme, harus dijauhkan dari paradigma pembangunan. Hal ini dikarenakan tidak adanya rasa hormat/ *respect for nature* yang mendalam terhadap alam. Antroposentrisme terus menerus membayangi paradigma pembangunan berkelanjutan. Kita harus meletakkan kebijakan baru yang membawa pengaruh cukup besar untuk mengubah alam ini menjadi lingkungan yang sehat dan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia. Jika alam ini sehat maka manusia pun akan hidup sehat dan harmonis dengan alam.

Sebenarnya etika disini adalah sebagai bentuk kontrol bukan bentuk praktis untuk mengubah cara manusia dalam melakukan pembangunan. Etika tidak lain adalah memberikan pandangan mana yang tepat dilakukan dalam menjawab masalah nilai. Jika kita ingin mengaplikasikan bentuk etika, khususnya etika lingkungan maka ada sebuah gerakan yang disebut dengan *ecosophy*. Disini *ecosophy* merupakan gerakan baru dari *deep ecology* untuk lebih menghargai alam dalam bentuk praktis. Dengan kata lain, paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan (Keraf 167).

4. 3 *Ecosophy* Sebagai Gerakan Baru

Ecosophy merupakan sebuah gerakan dari *deep ecology*. Secara etimologi *ecosophy* terdiri dari *eco* adalah rumah tangga dan *sophy* berarti kearifan jadi *ecosophy* adalah sebuah bentuk kearifan dalam mengatur rumah tangga. Rumah tangga disini adalah alam dan kearifan itu adalah cara manusia mengatur alam ini. Dalam hal ini filsafat pokok DE disebut Naess sebagai *ecosophy* (Keraf 78). *A*

*central slogan of ecosophical lifestyle : ' Simple in means, rich in ends. ' (Naess 88). Manusia dengan *ecosophy* coba diarahkan untuk bertindak hormat terhadap alam dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan alam.*

Manusia dalam melihat pembangunan harus melihat bahwa alam itu adalah sebuah rumah tangga. Dimana manusia harus melihat berbagai aspek untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan orang banyak. Dalam *ecosophy* nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan adalah kepedulian, penghargaan, pengakuan serta kesadaran bahwa hanya dengan memelihara alam manusia bisa hidup dengan nyaman. Hidup dengan nyaman disini maksudnya adalah bentuk keharmonisan antara manusia dengan alam. *Ecosophy* disini juga harus dipahami sebagai gerakan baru yang berpijak pada gaya hidup yang tetap menghormati dan melihat alam ini bernilai serta melihat kualitas dari kehidupan bukan kuantitas materi.

Penggunaan *ecosophy* dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mengupayakan tiap-tiap individu untuk sadar akan keberadaannya di alam ini dan mau mengubah gaya hidupnya yang selama ini hanya mengejar nilai materi. Seperti kita tahu bahwa pandangan *deep ecology* meletakkan manusia sebagai bagian dari alam, dan manusia juga turut memberikan pengaruh terhadap alam begitu pula alam turut memberikan pengaruh terhadap manusia. *Ecosophy* sebagai gerakan untuk menyadarkan manusia akan keserakahannya bertumpu pada delapan platform *deep ecology*. *A platform of the deep ecology movement* (George 68 ; Naess 29 ; Amstrong Richard, 412) :

1. *The well-being and flourishing of human and nonhuman Life on Earth have value in themselves (synonyms: intrinsic value, inherent value). These values are independent of the usefulness of the nonhuman world for human purposes.*
2. *Richness and diversity of life forms contribute to the realizations of these values and are also values in themselves.*
3. *Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital human needs.*

4. *The flourishing of human life and cultures is compatible with a substantial decrease of human population. The flourishing of nonhuman life requires such a decrease.*
5. *Present human interference with the nonhuman world is excessive, and the situation is rapidly worsening.*
6. *Policies must therefore be changed. These policies affect basic economic, technological, and ideological structures. The resulting state of affairs will be deeply different from the present.*
7. *The ideological change is mainly that of appreciating life quality (dwelling in situations of inherent value) rather than adhering to an increasingly higher standard of living. There will be a profound awareness of the difference between big and great.*
8. *Those who subscribe to the foregoing points have an obligation to directly or indirectly try to implement the necessary changes.*

Delapan platform *deep ecology* (Kerf 84-85):

1. Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi ini mempunyai nilai pada dirinya sendiri. nilai-nilai ini tidak tergantung dari apakah dunia di luar manusia mempunyai kegunaan atau tidak bagi kehidupan manusia
2. Kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan mempunyai sumbangsih bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dan juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan mempunyai sumbangsih bagi perkembangan manusia dan bukan manusia di bumi ini
3. Manusia tidak mempunyai hak untuk mereduksi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital
4. Perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaannya berjalan seiring dengan penurunan yang cukup berarti dari jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan di luar manusia membutuhkan penurunan jumlah penduduk

5. Campur tangan manusia dewasa ini terhadap dunia di luar manusia sudah sangat berlebihan, dan situasi ini semakin memburuk
6. Perlu ada perubahan kebijakan, sehingga mempengaruhi struktur ekonomi, teknologi dan ideologi. Hasilnya akan berbeda dari keadaan sekarang ini
7. Perubahan ideologis terutama menyangkut penghargaan terhadap kualitas kehidupan dan bukan bertahan pada standar kehidupan yang semakin meningkat. Akan muncul kesadaran mengenai perbedaan antara besar dan megah
8. Orang-orang yang menerima pokok-pokok pemikiran itu mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk ikut ambil bagian mewujudkan perubahan-perubahan yang sangat diperlukan.

Dengan delapan platform diatas maka jelas tujuan dari gerakan *ecosophy* adalah ingin memberikan batasan dasar kepada manusia dalam mengelola alam ini. Batasan tersebut dapat berupa kebijakan publik, politik, ekonomi, dan batasan pribadi dalam berelasi dengan alam. Alam ini bukanlah benda yang dapat di produksi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Alam ini adalah sebuah entitas yang mempunyai batas. Jika kita kaitkan antara prinsip *ecosophy* dikaitkan dengan pola pembangunan berkelanjutan, maka arah yang dituju adalah kualitas hidup dan bukan kualitas materi atau dasar hitung-hitungan ekonomi. Nilai untung rugi tidak lagi menjadi prioritas, melainkan nilai hidup yang menjadi prioritas utama dari *ecosophy*.

Delapan platform diatas juga terbuka untuk perkembangan kedepannya. Keterbukaan disini adalah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menciptakan gerakan baru dan platform baru tetapi dengan tetap berpegang bahwa manusia adalah bagian dari alam, tetap menghargai alam sebagai sesuatu yang bernilai dan adanya prinsip *biospheric egalitarianism* yang terbuka. Hal ini dikarenakan dalam gerakan *deep ecology* manusia harus melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini (George 464).

Ecosophy di sini lebih mengarahkan manusia dan kebijakan pemerintah, untuk memberikan gaya hidup baru yang menjauhkan nilai materi tetapi mengedepankan nilai kehidupan. *Ecosophy* juga meletakkan nilai ketergantungan tiap entitas (simbiosis mutualisme) dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan

ketidakmungkinan satu makhluk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa ada penyokong atau pendukung kehidupan. Dengan berpegang bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia perlu mengatur alam ini sedemikian rupa agar mampu menyediakan kebutuhan manusia dengan batasan kebutuhan vital manusia. Kebutuhan vital disini tidak dapat disama-ratakan antara negara satu dengan yang lain. Tetapi dasar utama kebutuhan vital disini adalah kesehatan, sandang, pangan dan papan.

4. 4 Kesalahan Arah Pembangunan

Pembangunan merupakan indikator dari kemajuan suatu negara. Kita pun harus menyadari bahwa selama ini dengan adanya pembangunan maka kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Kemajuan ini memberikan dampak positif dalam bidang teknologi dan kemajuan peradaban manusia. Sedangkan di sisi lain pembangunan juga memberikan dampak negatif terhadap alam. Dampak negatif ini muncul dikarenakan kesalahan arah dari pembangunan yang sebenarnya. Dimana kesalahan arah pembangunan adalah terletak pada dasar tujuan yang hanya didasarkan pada hitung-hitungan ekonomi, yang akhirnya mengarahkan manusia pada kehancuran yang perlahan tapi pasti.

Negara dikatakan maju jika negara tersebut telah mencapai tingkat ekonomi yang tinggi dengan kesejahteraan penduduknya yang meningkat. Dengan dasar ekonomi inilah maka banyak negara yang bersaing untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan persaingan ekonomi maka setiap negara akan meningkatkan tingkat produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar akan permintaan barang. Hal inilah yang memberikan ruang bagi para kapitalisme untuk terus menyusup masuk ke dalam paradigma pembangunan. Pertumbuhan produksi disini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sebagai contoh jumlah kendaran di kota Jakarta meningkat 11% tiap tahunnya.
2. Pertumbuhan bangunan yang tiap tahun meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan tuntutan lahan produksi yang semakin bertambah.

3. Tidak adanya keseimbangan antara pembangunan dengan pelestarian. Dalam hal ini penggunaan alam lebih mayoritas dibandingkan dengan pelestarian alam yang dilakukan manusia.

Paradigma pembangunan yang hanya didasarkan pada faktor ekonomi belaka merupakan tolak ukur yang salah dalam menerapkan pola pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana dilontarkan oleh Naess dan ahli etika lingkungan lainnya, kekayaan alam selalu dibaca dan dilihat semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang siap dieksplotasi demi pertumbuhan ekonomi (Keraf 171). Hal ini dikarenakan manusia hanya melihat aspek materi sebagai tingkat kemajuan suatu negara. Alam hanya dipandang sebagai alat pendukung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini paradigma diatas masih berpegang pada prinsip antroposentrisme. Dimana dalam paradigma antroposentrisme alam ini di lindungi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, bukan di lindungi karena melihat alam ini memang bernilai (George 413). Di sini kita harus melihat bahwa dalam proses pembangunan jangan disamakan dengan pertumbuhan ekonomi (Attfield 134). Jika kita menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pembangunan maka alam ini akan cepat habis untuk memenuhi permintaan manusia akan kebutuhan yang terus menerus bertambah dan akhirnya berujung pada bencana.

Tujuan hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik sangat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Kesalahan cara pandang atau pemahaman manusia tentang keberadaannya dengan alam mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Cara pandang yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme dimana manusia memandang bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan cenderung tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme menjadi cepat berkembang dikarenakan cara pandang antroposentrisme yang terbuka lebar tanpa ada batasan. Kesalahan cara pandang akan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ikut pula

mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi yang tidak tepat guna atau tepat sasaran. Teknologi dalam perkembangannya hanya dipandang sebagai bentuk persaingan ilmu untuk mengejar nilai ekonomi yang tinggi.

4. 5 Peran Pemerintah Dalam Proses Pembangunan

Kesalahan arah pembangunan dewasa ini adalah pembangunan tidak dilandaskan pada prinsip kesatuan ekologis dan juga keberlanjutan ekologis. Manusia masih memandang bahwa alam ini adalah instrument. Dalam hal ini alam digunakan sebagai alat untuk memenuhi semua permintaan manusia dalam persaingan ekonomi dan untuk pencapaian kemakmuran manusia belaka. Manusia menganggap dirinya berada diluar alam. Manusia juga menganggap bahwa manusialah makhluk yang superior dan alam dipandang sebagai makhluk inferior, tanpa manusia alam ini tidak dapat berkembang dan tidak berarti bagi dirinya sendiri. Pandangan seperti inilah yang akhirnya mengarahkan pada persaingan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal pertumbuhan ekonomi. Manusia terus bersaing satu sama lain dan terus menggunakan alam tanpa kontrol nilai yang jelas. Dalam hal ini peran pemerintah adalah sebagai pengendali kebijakan, harus mampu mengontrol pertumbuhan penduduk, mengontrol arah pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan kebijakan politik lingkungan dengan tegas meletakkan prinsip *biospheric egalitarianism* yang terbuka. Terbuka disini adalah sebagai bentuk penghargaan bahwa setiap makhluk itu mempunyai hak untuk hidup dan adanya saling ketergantungan satu sama lain di alam ini.

Alam tidak lagi mempunyai ruang sebagai entitas yang bernilai dan ruang untuk “bernafas”, dalam hal ini untuk berkembang-biak sesuai dengan habitatnya. Hal ini karena alam hanya dipandang sebagai instrument belaka bagi manusia. Pola pembangunan yang seperti ini jika dijadikan dasar maka alam ini akan cepat hancur dikarenakan alam tidak dapat memenuhi semua permintaan manusia, yang terus-menerus bertambah. “Hutan beton” (gedung-gedung bertingkat) kini lebih banyak dibandingkan dengan hutan kayu (hutan hujan tropis, hutan lindung dan jenis hutan lainnya) yang semakin berkurang karena untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Dengan semakin banyaknya “hutan beton” maka resapan air tidak lagi sempurna, hal inilah yang menyebabkan bencana alam dan ketidakharmonisan manusia dengan alam. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman bahwa alam ini juga mempunyai batasan kekuatan untuk menyediakan kebutuhan bagi manusia.

Kesalahan arah pembangunan tidak saja memberikan kerugian pada lingkungan tetapi juga memberikan kerugian kepada manusia. Kerugian tersebut dapat berupa bencana alam yang terus-menerus terjadi. Perubahan kondisi alam tersebut seperti banjir, tanah longsor, bahkan dapat menimbulkan bencana kelaparan bagi manusia sendiri dikarenakan alam sudah tidak sanggup lagi untuk menahan beban yang diberikan manusia. Dalam hal ini tidak ada lagi kontrol dari manusia untuk membatasi tindakannya menggunakan alam. Dimana manusia terus menerus menggunakan alam, seakan-akan alam ini tidak akan ada habisnya untuk memenuhi semua kebutuhan manusia.

Seperti kita ketahui, manusia dalam pembangunannya terus menerus mengejar nilai materi dan tidak lagi melihat kualitas hidup dan keberlanjutan ekologis. Hal ini dikarenakan kontrol nilai dan tindakan yang minim dalam membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini sebenarnya manusia harus mempunyai batasan nilai sebagai pengontrol untuk mengontrol tindakan yang telah melampaui batas wajar.

Prinsip *Non interference* sangat dibutuhkan untuk memberikan batasan gerak bagi manusia dalam menggunakan alam ini. *Non interference* merupakan salah satu bagian dari kewajiban utama manusia sebagai subjek moral untuk menghormati alam. Dalam *non interference* manusia harus memberikan ruang bagi alam untuk bebas berkembang biak secara leluasa dengan alami. Dalam hal ini bukan berarti manusia tidak boleh menggunakan alam, melainkan penggunaan alam haruslah dengan berdaya-guna, dengan kehati-hatian dan dengan sikap yang arif dan bijaksana, dan diiringi dengan rasa tanggung-jawab.

Kebijaksanaan disini adalah bentuk pengaturan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologis. Dalam hal ini perlu adanya *eco politic* untuk mengarahkan pemerintah mengubah pola pembangunan yang dilakukan

disetiap negara. Sasaran dari *eco politic* adalah mencapai suatu keberlanjutan ekologis secara luas yang berjangkauan jauh kedepan (Keraf 96). Dalam setiap kebijakan yang dibuatpun masyarakat perlu tahu agar ada kontrol yang mengarahkan kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ada keterbukaan dan keseimbangan dengan masyarakat.

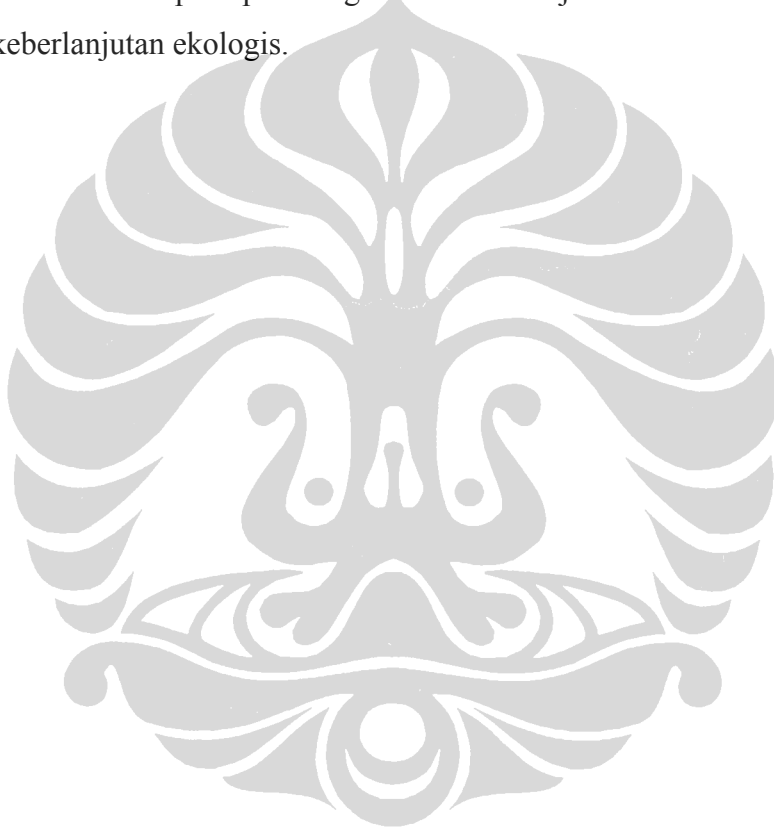
4. 6 Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai pengarah kebijakan juga harus meletakkan dasar yang kuat untuk mengarahkan segala kebijakannya kepada arah yang menghormati keberadaan entitas lain sebagai kesatuan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan kebijakan dari pemerintah dalam pengolahan alam. Hal ini dimaksudkan untuk adanya keseimbangan tujuan antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga ada kontrol akan kebijakan lingkungan. Hal ini tercantum pada undang-undang No.23 tahun 1997 tentang partisipasi aktif masyarakat. Isi undang-undang tersebut antara lain adalah :

1. Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup
3. Hak masyarakat melakukan kontrol publik
4. Hak setiap orang melakukan saran dan pendapat
5. Hak menyampaikan pendapat dan/atau menyampaikan laporan
6. Hak menyampaikan pendapat dalam proses pemberian izin
7. Hak meminta pencabutan izin kepada pejabat administrasi atas pelanggaran yang dilakukan
8. Hak LSM mengajukan gugatan perdata walaupun bukan sebagai korban

Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari Undang-Undang diatas adalah agar masyarakat mengetahui mau kemana arah kebijakan pemerintah ini. Dengan mengetahui arah kebijakan yang dilakukan pemerintah maka di dalamnya ada kontrol untuk mengarahkan kebijakan pemerintah.

Masyarakat disini mempunyai peranan penting. Hal ini dikarenakan jika tidak ada kontrol dari masyarakat maka dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang demi memenuhi kebutuhan pejabat publik belaka. Kontrol disini adalah dengan memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah agar tetap melihat sisi nilai pada alam. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia juga ditentukan dari kondisi alamnya. Kondisi alam ditentukan dari kebijakan manusia dalam mengolah alam ini. Jelas dalam hubungannya manusia mempunyai keterkaitan dengan alam, maka dari itu alam ini harus diperlakukan secara wajar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan untuk mempertahankan keberlanjutan ekologis.



BAB 5

Refleksi Kritis

Cara pandang antroposentrisme merupakan masalah awal dari ketidakharmonisan manusia dengan alam. Cara pandang antroposentrisme melihat bahwa alam ini hadir hanya untuk memenuhi semua kebutuhan manusia belaka. Dimana dalam prinsip antroposentrisme manusia seakan-akan makhluk yang paling superior dan tidak ada makhluk lain yang dapat menyaingi keberadaannya. Manusia terus mendominasi alam tanpa melihat bahwa keberadaan alam yang sebenarnya mempunyai nilai dan hak untuk tetap hidup sesuai dengan habitatnya. Manusia juga menganggap bahwa manusia itu merupakan makhluk yang terpisah keberadaannya dengan alam, hal inilah yang memperkuat bahwa alam ini ada sekedar memenuhi kebutuhan manusia belaka.

Cara pandang lama inilah, antroposentrisme, terus menerus diprotes karena mengarahkan alam ini pada kehancuran secara perlahan namun pasti. Dominasi manusia atas alam ini berusaha di damaikan dengan cara pandang *deep ecology* yang meletakkan prinsip *biospheric egalitarianism*. Dalam prinsip *biospheric egalitarianism* manusia memandang bahwa kehidupan ini mempunyai status yang sama dengan makhluk lain. *Biospheric egalitarianism* disini harus dimengerti sebagai keterbukaan pemikiran manusia terhadap alam, dimana manusia selama ini manusia menganggap bahwa makhluk diluar manusia tidak mempunyai nilai. Keterbukaan dalam *biospheric egalitarianism* juga merupakan ruang bagi alam untuk mendapatkan hak. Hak disini adalah bentuk penghormatan manusia terhadap alam. Tentu dengan mengedepankan hak alam maka manusia akan mengarahkan kebijakannya pada prinsip-prinsip yang ada dalam *deep ecology*.

Penerapan prinsip *deep ecology* coba direalisasikan lewat tindakan praktis. Tindakan praktis disini berupa pola pembangunan yang dilakukan manusia. Pembangunan di sini dipahami sebagai pembangunan berkelanjutan. Penambahan kata berkelanjutan di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa pembangunan tidak hanya memprioritaskan pada waktu yang singkat atau

sementara dan juga hanya sekedar memenuhi kebutuhan manusia belaka. Berkelanjutan dimaksudkan adanya paham, bahwa perlu adanya paham kesatuan ekologis dan juga keberlanjutan ekologis dalam prinsip pembangunan. Dengan mengedepankan prinsip kesatuan dan keberlanjutan ekologis, maka manusia tidak lagi menilai bahwa kehidupan itu hanya diukur berdasarkan nilai materi melainkan di dasarkan pada nilai-nilai kehidupan.

Pembangunan selama ini dipandang sebagai bentuk kemajuan suatu negara. Barometer dari suatu pembangunan selama ini hanya di dasarkan pada pertumbuhan ekonomi belaka (*economic growth*). Hal inilah yang membuat adanya eksplotasi besar-besaran yang dilakukan manusia, paham kapitalis pun dapat bebas menyusup ke dalam kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan hanya melihat satu aspek yaitu pertumbuhan ekonomi belaka maka akan muncul persaingan nilai materi. Hal ini turut membawa adanya kelas-kelas dalam kehidupan, karena manusia hanya melihat bahwa kehidupan ini hanya dilihat berdasarkan nilai materi. Sebagai contoh : jika pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat minim maka negara tersebut akan terus-menerus mengupayakan agar pendapatan ekonominya meningkat. Proses peningkatan ekonomi disini dengan berusaha untuk meningkatkan tingkat produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Peningkatan produksi di sini melibatkan alam sebagai media untuk memenuhi permintaan akan barang. Dalam hal inilah alam terus dieksploitasi semata-mata untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup manusia belaka.

Manusia perlu mengubah gaya hidupnya yang selama ini mengedepankan nilai materi dan sifat hedon. Gaya hidup disini dimaksudkan sebagai bentuk nyata kepedulian manusia akan lingkungan yang sudah semakin hancur. Perubahan gaya hidup ini lah yang menjadi dasar utama untuk menerapkan paradigma yang ada pada *deep ecology*. Seperti kita ketahui bahwa *ecosophy*lah yang menjadi jalan keluar untuk mengubah gaya hidup manusia yang selama ini hanya menilai kehidupan berdasarkan pada materi menuju pada kualitas dari kehidupan. Manusia harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari alam ini, dan manusia harus sadar juga akan keberadaannya saling mempengaruhi atau mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Dengan adanya kesadaran dari manusia bahwa manusia merupakan bagian dari alam, dan mempunyai ketergantungan hidup terhadap alam. Maka manusia akan mengarahkan kebijakan pembangunannya pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan disini bukanlah keberlanjutan manusia belaka, namun setiap entitas atau makhluk hidup yang ada di bumi menjadi prioritas dalam arah dari kebijakan yang dibuat. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi dasar kehidupan manusia untuk berinteraksi dengan alam.

5.1 Keberlanjutan Sebagai Jalan Utama

Masih banyak manusia yang hanya menggunakan kata keberlanjutan sebagai bentuk aman dalam membuat sebuah kebijakan lingkungan. Kata keberlanjutan di sini harus dipahami secara benar dan tepat. Hal ini dikarenakan jika kata keberlanjutan dipahami secara salah maka arah dari kebijakan sebuah pembangunan pun akan salah atau gagal. Kata keberlanjutan adalah sebuah penegasan akan “ ketersediaan ruang ” bagi alam. Seperti kita tahu bahwa alam selama ini dipandang tidak bernilai dan hanya sebagai instrument belaka.

Pembangunan berkelanjutan harus pula dipahami sebagai bentuk perkembangan dua arah. Arah pertama untuk perkembangan manusia itu sendiri dan yang kedua adalah untuk alam itu sendiri. Dimana alam diletakkan sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Manusia harus menyadari bahwa dengan adanya keberlanjutan alam, maka manusia pun dapat terus berkembang. Manusia juga harus sadar bahwa dengan menyelamatkan lingkungan maka manusia pun akan terselamatkan. Hal ini dikarenakan kehidupan ini adalah sebuah keterkaitan atau layaknya jaringan yang saling mempunyai keterkaitan dalam pembentukan kehidupan.

Jalan yang selama ini ditempuh manusia selama ini adalah sebuah jalan yang mengedepankan nilai-nilai materi. Hal inilah yang mengakibatkan adanya konflik kepentingan dalam mengambil kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, harus berani menindak dan menegaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan bukan semata-mata hanya mencari nilai materi belaka.

Sosialisasi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini perlu diinformasikan secara merata dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar adanya paradigma baru, bahwa dalam proses pembangunan perlu melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai dan mempunyai hak. Dimana tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah sebagai bentuk kesatuan ekologis (melihat nilai kehidupan) dalam orientasi pembangunan berwawasan lingkungan. Peran masyarakat dalam proses pembangunan juga sangat diperlukan. Peran disini berupa kontrol terhadap arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sangat penting dikarenakan tanpa adanya kontrol maka arah pembangunan hanya datang dari pihak pemerintah saja.

5. 2 Nilai Kehidupan Bukan Nilai Materi

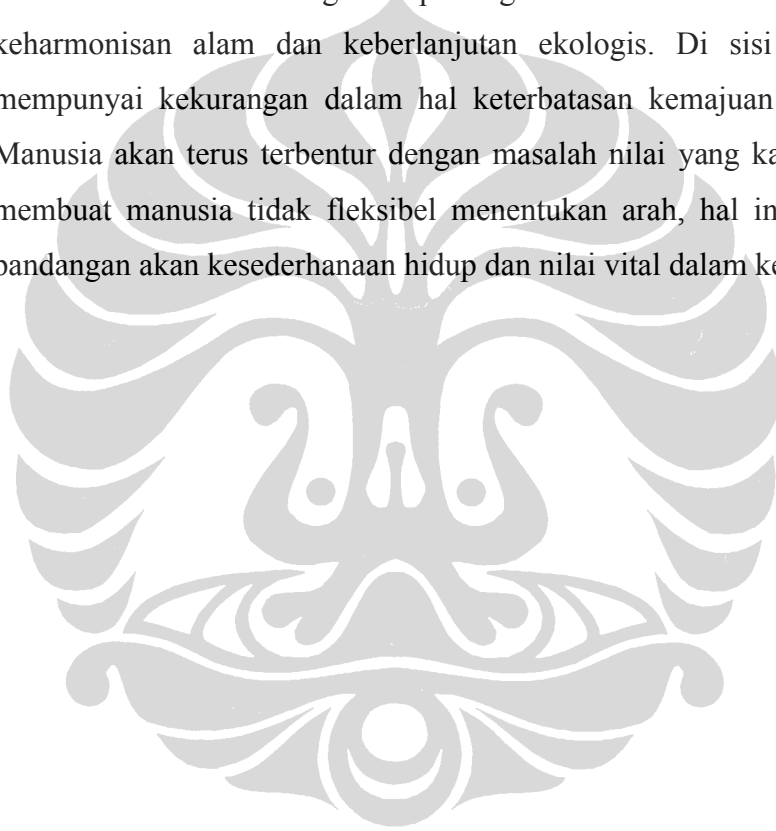
Keterarahan manusia pada masa modern ini bukan lagi pada nilai kehidupan, melainkan pada nilai materi. Nilai materi di sini adalah sebuah tujuan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dimana nilai ekonomi di sini semakin mempertegas adanya kesenjangan sosial. Adanya orang miskin dan orang kaya adalah salah satu dampak yang terjadi dalam persaingan ekonomi. Manusia seharusnya sadar dan mengubah cara pandang hidupnya kearah yang lebih menghargai kehidupan sebagai sesuatu yang berarti.

Dengan adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan ini bukan nilai materi yang menjadi tujuan. Maka akan dimungkinkan dalam kehidupan ini akan adanya keharmonisan antara manusia dengan alam. Alam harus dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dan hak untuk hidup. Tanpa alam yang sehat maka manusia pun tidak akan dapat hidup dengan sehat pula. Perubahan gaya hidup menjadi dasar dari gerakan *ecosophy*.

Philippe Vaquette dalam *Le Guide De L'Eduteur Nature* mengatakan, sebagaimana manusia membutuhkan dokter karena suatu penyakit, bumi juga membutuhkan “dokter” untuk alasan yang sama. Idealnya, dokter baik ialah dokter yang membantu pasien mencegah penyakit (Kunaifi para 7). Dokter dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang dinamakan *ecosophy*. Manusia harus mau mengubah cara pandang dan gaya hidupnya yang selama ini berorientasi pada nilai materi belaka. Perlu ada paradigma baru yang melekat di

dalam pemikiran tiap-tiap individu. Hal ini menjadi penting karena alam sudah tidak lagi bersahabat, dan alam sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi semua permintaan manusia.

Harus kita sadari pula alam ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu kebutuhan vitallah yang menjadi prioritas utama dalam gerakan *ecosophy*. Manusia harus mampu menahan hasrat materi yang berlebih. Hal ini dimaksudkan agar adanya keseimbangan kehidupan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Perlunya kesadaran manusia untuk mau berubah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan agar terciptanya keharmonisan alam dan keberlanjutan ekologis. Di sisi lain *ecosophy* pun mempunyai kekurangan dalam hal keterbatasan kemajuan peradaban manusia. Manusia akan terus terbentur dengan masalah nilai yang kaku. Hal ini lah yang membuat manusia tidak fleksibel menentukan arah, hal ini disebabkan adanya pandangan akan kesederhanaan hidup dan nilai vital dalam kehidupan.



DAFTAR REFERENSI

- Attfield, Robin. *The Ethics of The Global Environment*. Indiana : Purdue University Press.1999
- . *The Ethics of Environmental Concern*. Inggris : Basil Blackwell Publisher. 1983.
- Bertens, Kess. *Etika*. Jakarta: Gramedia.1993.
- Carm, P.Go O. *Etika Lingkungan Hidup*. Malang: Penerbit Dioma.1989
- Des Jardins,Joseph R. *Environmental Ethics: an introduction to environmental philosophy*. USA:Wadsworth Publishing Company.1997
- J.Amstrong, Susan.,G.Botzler,Richard. *Environmental Ethic: Divergence and Convergence*. New York: Mc Graw-hill.inc.1993
- Keraf, Sony. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.2002
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab*.Jakarta : Lembaga alkitab Indonesia.2006
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an ecosophy*. Cambridge, Inggris: Cambridge University Press.1989.
- Nash, Roderic Frazier. *The Rigths of Nature : A History of Environmental Ethics*. USA: The University of Wisconsin Press. 1989
- Sessions, George (ed.). *Deep Ecology for The 21st Century*.Boston. Shambhala.1995
- Singer, Peter. *Practical Ethics (2nd ed.)*.New York,NY: Cambridge University Press.1993.
- Taylor, Paul W. *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. USA: Princenton Univ.Press. 1986
- Tucker, Mary Evelyn & John A Grim. *Agama, Filsafat, Lingkungan Hidup*. (P. Hardono Haidi, Penerjemah). Yogyakarta : Kanisius. 2007
- Widianarko, Budi,dkk. *Menelusuri jejak Capra*. Yogyakarta : Kanisius. 2008.

Sumber internet

- “Data dari BPS”. 16 Maret 2010 pukul 13.10 WIB
 <http://www.bps.go.id/tab_sub/print.php?id_subyek=17%20¬ab=12>
- A.Butler,Rhett.”Indonesia : Profil lingkungan”. 8 April 2010 pukul 21.15 WIB
 <<http://world.mongabay.com/indonesian/profil.html>>
- Alamendah.”Tingkat pencemaran udara di Indonesia”. 17 Maret 2010 pukul 23.25 WIB
 <<http://alamendah.wordpress.com/2009/09/23/tingkat-pencemaran-udara-di-indonesia/>>
- Aprillins.”Teori etika lingkungan biosentrisme”. 12 April 2010 pukul 20.08 WIB
 <<http://aprillins.com/teori-etika-lingkungan-biosentrisme>>
- Kunafi. “Etika lingkungan”.17 maret 2010 pukul 22.30 WIB
 <<http://kunaifi.wordpress.com/2007/12/04/etika-lingkungan>>
- Mubarok, Ahmad Fahmi.”Etika lingkungan Sony Keraf”. 6 April 2010 pukul 20.10 WIB
 <<http://komunitasembunpagi.blogspot.com/2008/11/etika-lingkungan-sony-keraf.html>>
- Radjimo.”Menyimak keluhan alam”.15 Maret 2010 pukul 23.20 WIB
 <<http://radjimo.multiply.com/reviews/item/1>>
- Syadiashare.”Jenis hutan dan fungsi hutan”. 31 Maret 2010 pukul 21.05 WIB
 <<http://syadiashare.com/jenis-dan-fungsi-hutan.html>>